REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB
UNTUK PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK
ATAS PENANAMAN MODAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");

BERKEINGINAN untuk saling meningkatkan kerja sama ekonomi yang lebih besar dalam hal penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal salah satu Pihak di wilayah negara Pihak lainnya;

MENYADARI bahwa peningkatan dan perlindungan timbal balik Penanaman Modal tersebut akan kondusif untuk menstimulasi kegiatan bisnis yang saling menguntungkan dan untuk meningkatkan kesejahteraan kedua belah Pihak.

MENYADARI bahwa kerangka kerja penanaman modal yang stabil akan memaksimalkan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber ekonomi dan meningkatkan standar hidup kedua belah Pihak;

MENGUATKAN komitmen kedua belah Pihak untuk memastikan perkembangan penanaman modal sedemikian rupa untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan kedua belah Pihak;

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :

PASAL 1

Definisi

Untuk tujuan Persetujuan ini :

1. Istilah 'Penanaman Modal adalah setiap jenis aset yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung dan diinvestasikan oleh penanam modal salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Pihak Lain dimaksud, antara lain termasuk:
   a. benda bergerak dan tidak bergerak serta hak-hak lain yang terkait, seperti hipotek, jaminan, hak menikmati hasil dan hak-hak lain yang serupa;
   b. perusahaan, saham, modal, maupun bentuk-bentuk lain penyertaan dalam perusahaan;
   c. surat hutang, obligasi, pinjaman maupun bentuk lain dari hutang, termasuk pinjaman dari badan usaha milik negara ke badan usaha milik negara yang lain;
   d. hak kekayaan intelektual dan industri, yang terkait dengan penanaman modal;
   e. tagihan atas uang atau aset-aset lainnya, atau perbuatan yang bernilai ekonomis; dan
   f. hak-hak yang diberikan oleh undang-undang atau kontrak seperti konsesi, lisensi, surat kuasa atau izin-izin.

   Tagihan atas uang yang melibatkan jenis bunga sebagaimana disebutkan pada (a) sampai (f) di atas wajib tidak termasuk :
      i. kontrak komersil atas penjualan barang atau jasa oleh warga negara atau perusahaan salah satu Pihak kepada warga negara ataupun perusahaan di wilayah Negara Pihak lainnya, atau
      ii. perpanjangan piutang yang berhubungan dengan transaksi komersil seperti pembiayaan perdagangan.

   Agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai penanaman modal sebagaimana tujuan dari Persetujuan ini, suatu aset harus memiliki karakterisitik penanaman modal, termasuk durasi tertentu, komitmen modal atau sumber-sumber yang lain, perkiraan atas pendapatan atau keuntungan, dan perkiraan atas resiko.

   Keputusan arbitrase, perintah ataupun penilaian yang diberikan terkait penanaman modal wajib tidak dipertimbangkan sebagai penanaman modal sebagaimana tujuan dari Persetujuan ini.

2. Istilah 'penanam modal dari salah satu Pihak adalah :

   a. Perorangan, yang merupakan warga negara salah satu pihak sesuai peraturan perundang-undangan dari masing-masing Pihak tersebut.

   b. Badan hukum salah satu Pihak yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Pihak tersebut dan melakukan kegiatan usaha substantif di wilayah Negara Pihak tersebut.

3. Istilah 'wilayah' adalah :

   a. Untuk Republik Indonesia : wilayah darat, wilayah laut teritorial, perairan kepulauan, perairan dalam, termasuk dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya, dan ruang udara yang meliputinya, serta landas kontinen dan zone ekonomi ekslusif, dimana Indonesia memiliki kedaulatan, hak berdaulat maupun yurisdiksi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangannya dan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay.

   b. Untuk Persatuan Emirat Arab : wilayah dari Persatuan Emirat Arab, laut territorial nya, ruang udara dan wilayah dasar laut dimana Persatuan Emirat Arab sesuai dengan hukum internasional dan hukum Persatuan Emirat Arab mempunyai hak kedaulatan; termasuk Zona Ekonomi Eksklusif serta daratan dan pulau-pulau dibawah yurisdiksinya sehubungan dengan aktivitas apapun di perairannya, dasar laut, maupun bawah tanah yang terkait dengan eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam berdasarkan hukumnya dan hukum internasional.

PASAL 2
Ruang Lingkup

1. Persetujuan ini wajib berlaku untuk tindakan-tindakan yang dilakukan atau dipertahankan oleh salah satu Pihak tanpa diskriminasi apapun sehubungan dengan:

   a. penanam modal dari Pihak lain

   b. penanaman modal dari penanam modal Pihak lain

2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk penanaman modal oleh warga negara atau badan hukum dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya yang telah mendapat pengakuan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Pihak yang menjadi Negara tuan rumah. Untuk kepastian, Persetujuan ini wajib berlaku terhadap penanaman modal yang dilakukan di wilayah salah satu Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dari penanam modal Pihak lainnya sebelum atau sesudah Persetujuan ini berlaku secara efektif, tetapi wajib tidak

berlaku pada sengketa yang ada atau telah selesai sebelum Persetujuan ini berlaku secara efektif.

3. Terlepas dari Ayat 2 :
   a. Dalam hal Indonesia, sumber daya alam tidak termasuk dalam Persetujuan ini, kecuali yang ditentukan secara khusus oleh Pemerintah Indonesia.
   b. Hak-hak lain yang mana diberikan oleh hukum ataupun keputusan administratif yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, atau menurut kesepakatan, tidak termasuk izin/konsesi untuk mencari, mengeksplorasi, mengekstraksi dan mengekspoitasi sumber daya alam. Dalam hal Persatuan Emirat Arab, sumber daya alam tidak termasuk dalam Perjanjian ini.

4. Meskipun berlakunya Ayat 1 Pasal ini, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 (kepatuhan terhadap hukum nasional), Pasal 4 (tanggung jawab sosial perusahaan), Pasal 14 (hak untuk mengatur) wajib berlaku untuk penanam modal dari salah satu Pihak dan penanaman modalnya di wilayah Pihak lainnya.

5. Untuk kepastian, Persetujuan ini wajib berlaku hanya untuk tindakan-tindakan oleh salah satu Pihak yang dilakukan atau terjadi setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini terhadap Pihak tersebut.

6. Persetujuan ini wajib tidak berlaku untuk :
   a. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
   b. Jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah oleh badan atau otoritas terkait dari salah satu Pihak;
   c. subsidi atau hibah yang diberikan oleh pihak yang berwenang dari salah satu Pihak, termasuk pinjaman yang didukung pemerintah, jaminan, dan asuransi;
   d. Tindakan perpajakan.

PASAL 3

Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Tanpa prasangka terhadap Persetujuan ini, penanam modal dari salah satu Pihak dan penanaman modalnya wajib patuh terhadap seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan Pihak lainnya, dimana penanaman modal berada, berkenaan dengan pembentukan, perolehan, perluasan, pengelolaan, pengerjaan, penjualan atau pemindahan lainnya sehubungan dengan penanaman modal dimaksud.

PASAL 4

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Masing-masing Pihak wajib mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya untuk secara sukarela memasukkan dalam kebijakan internal mereka standar yang diakui secara internasional, pedoman, dan prinsip-prinsip dari tanggung jawab sosial perusahaan yang telah disahkan atau didukung oleh Pihak tersebut.

PASAL 5

Peningkatan Penanaman Modal

1. Masing-masing Pihak wajib meningkatkan penanaman modal oleh penanam modal Pihak lainnya di wilayah negaranya sesuai dengan kebijakan umum di bidang penanaman modal asing.

2. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa kewajiban yang timbul dari Persetujuan ini dilaksanakan.

PASAL 6

Perlakuan Penanaman Modal

1. Masing-masing Pihak wajib memberikan perlakuan yang wajar dan seimbang serta penuh perlindungan dan keamanan terhadap penanam modal dari Pihak lain termasuk penanaman modalnya yang diakui di wilayah tersebut sesuai dengan ayat 2 sampai dengan 4.

2. Salah satu Pihak melanggar kewajiban atas perlakuan yang wajar dan seimbang sebagaimana terdapat di ayat 1 apabila tindakan atau rangkaian tindakan yang dilakukan merupakan:
   a. Penyangkalan keadilan dalam proses adjukasi kriminal, sipil, ataupun administrasi;
   b. Pelanggaran mendasar dalam proses peradilan sipil dan administrasi;
   c. Diksriminasi tertentu berdasarkan alasan yang nyata salah, seperti jenis kelamin, ras, ataupun keyakinan agama;
   d. Perlakuan kasar, seperti paksaan, penyalahgunaan kekuasaan ataupun perlakuan buruk serupa, atau;
   e. Pelanggaran lebih lanjut dari kewajiban untuk perlakuan wajar dan seimbang yang dilakukan oleh para Pihak sesuai dengan ayat 3 Pasal ini.

3. Untuk kepastian, "perlindungan penuh dan keamanan" mengacu pada kewajiban Pihak untuk bertindak sebagaimana mestinya untuk melindungi keamanan fisik penanam modal dan penanaman modal yang telah diakui yang tidak menimbulkan kewajiban tambahan lain selain yang ditawarkan kepada warga negaranya dan warga negara asing lainnya.

4. Ketetapan bahwa telah terjadi pelanggaran atas ketentuan lain dari Persetujuan ini ataupun dari perjanjian internasional lain yang terpisah tidak dengan sendirinya berarti bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini.

PASAL 7

Ketentuan (*Most-Favoured-Nation)*

1. Setiap Pihak wajib memberikan kepada penanam modal dari Pihak lain dan penanaman modalnya perlakuan yang tidak boleh kurang menguntungkan dari yang seharusnya, dalam keadaan tertentu, untuk penanam modal dan penanaman modal dari negara ketiga manapun, terkait dengan pengelolaan, tindakan, pelaksanaan, dan penyelesaian dari penanaman modal.

2. Untuk kepastian, perlakuan yang disebutkan dalam ayat 1 wajib tidak meliputi mekanisme penyelesaian sengketa atau aspek prosedural dan peradilan manapun.

3. Untuk kepastian, kewajiban substantif dalam perjanjian internasional lainnya sebagaimana dimuat dalam ayat 1, tidak dapat dianggap 'perlakuan', sehingga tidak dapat dianggap menimbulkan pelanggaran atas Pasal ini.

4. Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini wajib tidak ditafsirkan sehingga mewajibkan satu Pihak untuk memperluas kepada penanam modal dari pihak lainnya keuntungan dari perlakuan apapun, hak keutamaan atau hak istimewa yang dihasilkan dari :
   a. Keanggotaan dari perjanjian integrasi ekonomi regional yang ada ataupun akan ada, ataupun organisasi dan kesatuan wilayah kepabeanan (*customs union)* yang mana salah satu Pihak adalah anggota atau kemungkinan menjadi anggota; atau
   b. Perjanjian internasional atau pengaturan manapun yang berkaitan seluruhnya atau sebagian besarnya terhadap perpajakan, atau undang-undang domestik yang terkait seluruhnya atau sebagian besar terhadap perpajakan.

PASAL 8

Perlakuan Nasional

1. Sesuai hukum dan peraturan perundang-undangannya, setiap Pihak wajib memberikan penanam modal dari Pihak lain dan penanaman modal mereka perlakuan yang tidak kalah menguntungkan, dalam keadaan serupa, untuk penanam modalnya dan penanaman modalnya, terkait dengan pengelolaan, tindakan, operasi, dan penyelesaian dari penanaman modal. Untuk kepastian, kalimat "sesuai hukum dan peraturan perundang-undangannya" wajib mencakup hukum dan peraturan perundang-undangan yang 'berlaku saat ini' ataupun akan ada nantinya, termasuk kelanjutan dan perubahannya.

2. Untuk kepastian, perlakuan yang diberikan oleh salah satu Pihak dalam ayat 1 diartikan, terkait dengan pemerintahan daerah, perlakuan yang tidak kalah menguntungkan daripada perlakuan yang paling menguntungkan yang diberikan, dalam keadaan serupa, dari pemerintah daerah dimaksud ke penanam modal, dan ke penanaman modal dari penanam modal, dari Pihak yang menjadi bagiannya.

PASAL 9

Ekspropriasi

1. Tidak ada Pihak yang dapat menasionalisasi atau mengekpropriasi penanaman modal dari penanam modal (selanjutnya disebut ekspropriasi) dari Pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tindakan yang memiliki efek setara dengan ekspropriasi atau nasionalisasi, kecuali :
   a. untuk tujuan kepentingan umum;
   b. dilakukan tanpa diskriminasi;
   c. dengan pembayaran kompensasi yang tepat waktu, memadai dan efektif sesuai dengan ayat 2 dan 3; dan
   d. sesuai dengan proses hukum.

2. Kompensasi dalam ayat 1(c) Pasal ini wajib setara dengan nilai pasar penanaman modal yang diekspropriasi sesaat sebelum ekspropriasi terjadi atau ekspropriasi dimaksud diketahui umum, mana saja yang lebih awal. Penilaian kewajaran nilai pasar dari investasi yang diekspropriasi wajib mengecualikan perhitungan keuntungan spekulatif atau perolehan besar tak terduga yang diklaim oleh penanam modal. Kompensasi wajib dapat dilaksanakan secara efektif, bebas dipindah-tangankan, danwajib dilakukan tanpa penundaan yang tidak sebagaimana mestinya.

3. Terlepas dari ayat 1 dan 2 setiap tindakan ekspropriasi langsung yang berkaitan dengan tanah wajib dilakukan :
   a. untuk tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangannasional Pihak dimana penanaman modal yang diekspropriasi berada; dan
   b. setelah pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.

4. Dimana nilai pasar yang wajar tidak bisa dipastikan, kompensasi wajib ditentukan dengan cara yang adil dengan mempertimbangkan semua faktor-faktor dan keadaan yang terkait, seperti modal yang diinvestasikan, sifat dan durasi investasi, penggantian, dan nilai buku.

5. Penanam modal dari salah satu Pihak yang terkena dampak dari ekspropriasi yang dilakukan oleh Pihak lainnya wajib berhak terhadap peninjauan ulang segera atas kasus tersebut melalui kewenangan peradilan atau kewenangan otoritas lain yang kompeten dan mandiri Pihak lainnya.

6. Pasal ini tidak berlaku untuk penerbitan lisensi wajib yang diberikan sehubungan dengan hak kekayaan intelektual sesuai hukum nasional negara tuan rumah, atau pencabutan, pembatasan, atau penciptaan hak kekayaan intelektual, sejauh penerbitan, pencabutan, pembatasan, atau penciptaan tersebut sesuai dengan hukum nasional negara tuan rumah.

PASAL 10
Ganti Kerugian

1. Penanam modal dari salah satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lainnya mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata lainnya, gangguan kerusuhan, situasi negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru hara di wilayah Pihak yang disebut terakhir, wajib diberikan oleh Pihak yang disebut terakhir tersebut, dengan restitusi , indemnifikasi, ganti rugi , atau penyelesaian lainnya, jumlah yang setara dengan yang diberikan oleh Pihak yang disebut terakhir dimaksud kepada penanam modal dari negaranya sendiri atau dari negara ketiga , pilihan mana yang lebih menguntungkan.

2. Tanpa prasangka terhadap paragraf 1 Pasal ini, penanam modal dari salah satu Pihak yang akibat dari kejadian tersebut di atas menderita kerugian di wilayah Pihak lainnya akibat perusakan terhadap penanaman modalnya atau bagian daripadanya dikarenakan paksaan atau kewenangan, yang mana tidak diperlukan dalam situasi dimaksud, wajib diberikan ganti rugi atau kompensasi.

PASAL 11

Transfer

1. Setiap Pihak wajib memperkenankan semua transfer terkait dengan penanaman modal yang dibuat secara bebas tanpa penundaan ke dalam dan ke luar wilayahnya. Transfer tersebut termasuk :
   a. modal awal dan jumlah tambahan untuk pemeliharaan atau peningkatan penanaman modal;
   b. Pendapatan;
   c. Hasil penjualan keseluruhan atau sebagian penanaman modal ataupun likuidasi menyeluruh ataupun sebagian penanaman modal;
   d. Pembayaran yang dibuat dibawah kontrak, termasuk perjanjian pinjaman
   e. Penghasilan dari personil yang berada di luar negeri yang berhubungan dengan penanaman modal di wilayahnya; dan
   f. Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan Pasal 9 (Ekspropriasi) dan 10 (ganti kerugian) dari Persetujuan ini.;

2. Setiap Pihak wajib memperkenankan transfer berkaitan dengan penanaman modal dilakukan dengan menggunakan mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas pada kurs pasar yang berlaku pada tanggal transfer.

3. Setiap Pihak wajib memperkenankan pendapatan dalam bentuk yang berkaitan dengan penanaman modal sebagaimana diperlukan atau ditentukan dalam perjanjian tertulis antara salah satu Pihak dan sebuah penanaman modal atau seorang penanam modal dari Pihak lainnya.

4. Terlepas Paragraf 1, 2, dan 3, Pihak dapat mencegah, menunda, atau menangguhkan transfer melalui penerapan hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan beritikad baik sehubungan dengan :
   a. kebangkrutan Kepailitan, ataupun perlindungan hak kreditur;
   b penerbitan, perdagangan dan transaksi sekuritas;
   c. kejahatan atau tindak pidana dan pemulihan hasil kejahatan;
   d. laporan keuangan atau pencatatan transfer bila diperlukan untuk membantu penegakan hukum ataupun kewenangan mengatur keuangan;
   e. memastikan kepatuhan terhadap perintah ataupun keputusan dalam proses peradilan atau administratif;
   f. jaminan sosial, pensiun publik atau skema tabungan wajib;
   g. pesangon karyawan; atau

h. persyaratan untuk mendaftar dan memenuhi formalitas lainnya yang diterapkan oleh Bank Central dan kebijakan-kebijakan lain yang diterapkan otoritas terkait dari salah satu Pihak

5. Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban dari Para Pihak sebagai anggota dari IMF dibawah Akta Pendirian IMF, termasuk kegunaan dari tindakan saling tukar yang sesuai dengan Akta Pendirian IMF.

PASAL 12
Penolakan Keuntungan

1. Salah satu Pihak dapat menolak keuntungan dari Persetujuan ini terhadap seorang penanam modal dari Pihak lain yang merupakan badan hukum Pihak Lain dimaksud dan untuk penanaman modal dari penanam modal tersebut dari non-Pihak yang memiliki atau memegang kendali atas badan hukum dan Pihak yang menolak memberikan keuntungan tidak memelihara hubungan diplomatik dengan non-Pihak dimaksud.

2. Salah satu Pihak dapat menolak keuntungan dari Perjanjian ini kepada seorang penanam modal yang merupakan badan hukum dari Pihak lainnya dan kepada penanaman modal dari penanam modal tersebut bila badan hukum tersebut tidak memiliki kegiatan usaha yang substansial di wilayah negara dari Pihak lain dan orang-orang dari non-Pihak, atau dari Pihak yang menolak, memiliki atau mengatur badan hukum tersebut.

3. Salah satu Pihak dapat menolak keuntungan dari Persetujuan ini kepada seorang penanam modal perorangan dari Pihak lainnya dan kepada penanaman modal dari penanam modal tersebut bila perorangan dimaksud memperoleh kewarganegaraannya untuk tujuan utama memperoleh keuntungan dari Persetujuan ini yang tidak akan tersedia untuk penanam modal tersebut dalam kondisi sebaliknya.

4. Salah satu Pihak bisa menolak memberikan keuntungan dari Persetujuan ini kepada seorang penanam modal perorangan dari Pihak lainnya dan kepada penanaman modal dari penanam modal tersebut bila perorangan tersebut juga adalah warga negara dari Pihak yang menolak memberikan keuntungan.

5. Salah satu Pihak dapat menolak memberikan keuntungan dari Persetujuan ini kepada seorang penanam modal dari Pihak lain yang merupakan badan hukum dari Pihak lain tersebut dan untuk penanaman modal dari penanam modal tersebut bila orang-orang dari non-Pihak memiliki atau mengendalikan badan hukum dan Pihak yang menolak memberikan keuntungan menjalankan atau memelihara tindakan terkait non-Pihak atau orang dari non-Pihak yang mencegah transaksi dengan badan hukum atau akan terjadi pelanggaran atau pembatasan apabila keuntungan dari Persetujuan ini diberikan kepada badan hukum atau penanaman modal nya.

PASAL 13

Pelarangan Persyaratan Pekerjaan

1. Tidak ada Pihak yangdapat membebankan atau memaksakan penanam modal Pihak lain persyaratan pekerjaan apapun terkait dengan pengelolaan, pelaksanaan atau operasional dari penanaman modal mereka di wilayah dari Pihak tersebut.

2. Tidak ada Pihak yang dapat membebankan atau memaksakan persyaratan dibawah ini, atau memaksakan komitmen atau usaha, dalam hubungan dengan pengelolaan, pelaksanaan atau operasional penanaman modal dari penanam modal dari Pihak lain di wilayah nya :
   a. Untuk mengekspor barang dengan tingkat atau persentase tertentu;
   b. Untuk mencapai konten domestik pada tingkat atau persentase tertentu;
   c. Untuk pembelian, menggunakan atau menyesuaikan dengan preferensi terhadap barang yang dihasilkan disediakan di wilayahnya, atau untuk pembelian barang atau jasa dari orang yang berada di wilayahnya;
   d. Untuk mengaitkan volume atau nilai impor ke volume atau nilai ekspor atau dengan jumlah arus masuk valuta asing yang terkait dengan penanaman modal tersebut.;

3. Ayat 1 dan 2 dari Pasal ini wajib tidak akan mengurangi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pihak negara tuan rumah.

4. Pasal ini wajib tidak berlaku terhadap penyelesaian sengketa antara penanam modal dan negara sesuai Pasal 17 dari Persetujuan ini (Penyelesaian Sengketa Investasi antara Penanam Modal dari salah satu Pihak dengan Pihak lain)

5. Sehubungan dengan Pasal ini, tindakan sewenang-wenang atau diskriminatif tidak dapat diterapkan oleh Pihak manapun.

PASAL 14

Hak Untuk Mengatur

1. Tidak ada dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan untuk mencegah salah satu Pihak dari menerapkan, mempertahankan, atau menegakkan setiap tindakan yang dianggap telah sesuai dengan Persetujuan ini dan tepat untuk:
   a. Menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dari Pihak tersebut yang tidak bertentangan dengan Persetujuan ini;
   b. melindungi lingkungan hidup atau manusia, atau kehidupan flora atau kesehatan;
   c. mengatur konservasi dari sumber daya alam hayati atau non-hayati yang tidak dapat diperbarui; atau
   d. memastikan pemeliharaan ataupun pemulihan perdamaian atau keamanan internasional, atau perlindungan kepentingan keamanannya sendiri yang esensial.

2. Pengadopsian, pemeliharaan, ataupun penegakkan tindakan tersebut tunduk pada persyaratan bahwa peraturan tersebut tidak diterapkan secara sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan atau tidak merupakan pembatasan pembatasan terselubung terhadap penanaman modal Pihak lainnya.

PASAL 15

Keterbukaan

1. Tiap Pihak wajib berusaha untuk menyediakan kepada pubiik hukum dan peraturan perundang-undangannya serta perjanjian internasional dimana Pihak dimaksud adalah pihak dalam perjanjian internasional tersebut, terkait hal-hal yang tercakup dalam Persetujuan ini.

2. Setiap Pihak wajib berusaha, atas permintaan Pihak lainnya, dalam jangka waktu yang wajar, menyediakan informasi untuk Pihak lainnya sehubungan dengan hal yang dimaksud dalam ayat 1.

3. Ketika mengenalkan ataupun mengubah hukum dan peraturan perundang-undangannya yang berdampak secara signifikan terhadap implementasi dan jalannya Persetujuan ini, setiap Pihak wajib berusaha mengambil tindakan yang tepat untuk memungkinkan orang yang berkepentingan dapat memahami pengenalan atau perubahan dimaksud.

PASAL 16

Subrogasi

1. Jika salah satu Pihak atau badan yang ditunjuknya melakukan pembayaran kepada penanam modalnya berdasarkan suatu jaminan, sebuah kontrak asuransi atau bentuk lain dari jaminan atas resiko-resiko non komersial yang terkait dengan penanaman modal, Pihak ain wajib mengakui subrogasi maupun pengalihan segala hak atau klaim dari penanaman modal dimaksud. Hak atau klaim subrogasi atau transfer tersebut tidak dapat melebihi hak atau klaim asli dari penanam modal. Hal ini, bagaimanapun, tidak berarti pengakuan dari pihak lain atas manfaat apapun atau jumlah klaim yang timbul darinya.

2. Ketika satu Pihak atau badan yang ditunjuknya telah melakukan pembayaran kepada penanam modal dari Pihak tersebut dan telah mengambil alih hak dan klaim dari penanam modal, penanam modal dimaksud wajib tidak boleh, untuk bertindak atas nama dari Pihak atau badan dimaksud untuk melakukan pembayaran, mengejar hak-hak dan klaim tersebut melawan Pihak lainnya, kecuali ditentukan sebaliknya.

3. Subrogasi wajib dilakukan setelah persetujuan terlebih dahulu dari Pihak yang menjadi Negara tuan rumah dimana penanaman modal dilakukan, jika persetujuan tersebut diminta oleh Pihak Negara tuan rumah.

PASAL 17

Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Penanam Modal dengan Pihak Lain

1. Pasal ini digunakan untuk sengketa hukum antara penanam modal dari salah satu Pihak dengan Pihak lain yang timbul dari penanaman modal penanam modal di wilayah negara Pihak lain. Sengketa tersebut wajib terkait dengan dugaan pelanggaran kewajiban Pihak berdasarkan Persetujuan ini yang menyebabkan kerugian atau kerusakan bagi penanam modal Pihak lain.

2. Untuk memulai konsultasi, penanam modal wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak. Pemberitahuan dimaksud wajib memuat spesifikasi detail dari sengketa, seperti :
   a. Nama dan alamat dari penanam modal yang bersengketa
   b. Ketentuan dari Persetujuan ini yang dianggap telah dilanggar; dan
   c. Fakta dan dasar hukum dari klaim tersebut.

3. Bila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu enam bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis, penanam modal yang bersengketa wajib mengajukan perkara ke sebuah *'komisi bersama adhoc'* (Komite Bersama) yang diketuai bersama oleh pejabat senior dari kedua Pihak dengan kehadiran dari penanam modal yang bersengketa atau yang ditunjuknya, untuk menyelesaikan sengketa dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Keputusan dari Komite Bersamawajib bersifat final dan mengikat dan wajib mengecualikan hak penanam modal untuk memajukan perkara di forum lain. Apabila Komite Bersama tidak dapat menerbitkan keputusan dalam waktu enam bulan sejak tanggal dimulainya proses, penanam modal dapat mengajukan sengketa ke salah satu dari forum berikut :

   a. Pengadilan yang kompeten di wilayah mana penanaman modal dilakukan; atau
   b. Arbitrase oleh Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi (PIPSI), yang didirikan oleh Konvensi atas Penyelesaian Sengketa Investasi antara negara dengan warga negara lainnya, dibuka untuk penandatanganan di Washington pada 18 Maret 1965 sepanjang kedua Pihak merupakan pihak pada konvensi tersebut; atau
   c. Fasilitas tambahan dari PIPSI, hanya bila salah satu Pihak adalah penandatangan Konvensi Washington; atau
   d. Arbitrase oleh Panel yang terdiri dari tiga arbiter sesuai dengan peraturan arbitrase dari Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (KHPIPBB), sebagaimana telah diamandemen pada tahun 2010.

4. Keputusan Panel wajib bersifat final dan mengikat. Setiap Pihak wajib memastikan pengakuan dan penegakkan dari keputusan arbitrase sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangannya serta norma-norma dan prinsip-prinsip dalam hukum internasional.

5. Sengketa-sengketa yang timbul dari kontrak yang dibuat antara penanam modal dan setiap entitas manapun yang ditunjuk mewakili Pihak atau pemerintah daerah nya tentang penanaman modal dari para penanam modal tersebut wajib diselesaikan menurut prosedur penyelesaian sengketa yang ditetapkan di dalam kontrak dimaksud.

6. Apabila sengketa penanaman modal telah diajukan untuk penyelesaian melalui salah satu forum yang disediakan di ayat 3 dari pasal ini, sengketa penanaman modal yang sama wajib tidak bisa diajukan untuk penyelesaian dalam forum lain yang tersedia di ayat 3 dari pasal ini.

7 Tidak ada sengketa penanaman modal yang bisa diajukan untuk penyelesaian oleh arbitrase dalam ayat 3 dari pasal ini bila paling sedikit tiga tahun telah berlalu sejak tanggal dimana penanam modal pertama kali mengetahui atau sepatutnya telah mengetahui dugaan pelanggaran dan kerugian atau kerusakan yang diduga telah terjadi.

PASAL 18

Penyelesaian Sengketa antara Para Pihak

1. Setiap sengketa antara para Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini, sedapat mungkin diselesaikan melalui konsultasi dan / atau saluran dipiomatik lainnya.

2. Bila para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam waktu enam bulan setelah tanggal konsultasi diminta dan/atau saluran diplomatik lainnya diprakarsai oleh salah satu pihak, sengketa wajib, atas permintaan pihak dimaksud, diajukan ke pengadilan arbitase. Dengan tidak adanya kesepakatan oleh para pihak yang mengatur sebaliknya, peradilan arbitrase wajib dilaksanakan sesuai dengan Aturan Arbitrase Opsional Pengadilan Permanen Arbitrase mengenai Perselisihan antar Negara, kecuali apabila ditentukan lain oleh para Pihak atau dalam Persetujuan ini.

3. Kecuali disetujui sebaliknya oleh para Pihak, sengketa wajib diselesaikan oleh tiga anggota Panel arbitrase. Tiap Pihak wajib menunjuk satu arbitrator dalam kurun waktu dua bulan sejak tanggal salah satu Pihak menerima dari Pihak lainnya permintaan untuk melakukan arbitrase. Dua arbitrator yang telah ditunjuk wajib bersama-sama dalam kurun waktu dua bulan selanjutnya menentukan arbitrator ketiga yang bukan merupakan warga negara dari para Pihak. Arbitrator ketiga yang telah disetujui oleh kedua Pihak wajib bertindak sebagai ketua Panel arbitrase.

4. Jika ada anggota dari Panel arbitrase yang tidak terpilih dalam waktu yang telah ditentukan di ayat 3 Pasal ini, Sekretaris Jenderal Peradilan Permanen Arbitrase, berdasarkan permintaan salah satu Pihak, wajib menunjuk berdasarkan kewenangan yang di milikinya, arbitrator atau para arbitrator yang belum ditunjuk.

5. Tempat berjalannya proses arbitrase wajib di Den Haag, Belanda.

6. Panel arbitrase wajib mencapai keputusannya berdasarkan mayoritas suara. Keputusan tersebut wajb bersifat final dan mengikat para Pihak.

7. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh arbitrator, dan biaya lain dalam proses arbitrase, wajib ditanggung bersama oleh kedua Pihak. Akan tetapi Panel arbitrase sesuai

kewenangannya, dapat memutuskan bahwa proporsi biaya lebih tinggi yang wajib dibayar oleh salah satu Pihak.

PASAL 19

Tindakan terkait Neraca Pembayaran

1. Salah satu Pihak dapat, dengan cara yang tidak diskriminatif, mengadopsi atau menjaga batasan atas pembayaran atau transfer terkait dengan penanaman modal dalam situasi serupa seperti :
   a. dalam hal terjadi permasalahan neraca pembayaran serius dan kesulitan keuangan eskternal atau ancaman daripadanya; atau
   b. dalam hal dimana, dalam keadaan luar biasa, pergerakan modal menyebabkan atau mengancam akan menimbulkan kesulitan serius bagi manajemen makroekonomi, khususnya kebijakan moneter dan nilai tukar.

2. Pembatasan yang disebut dalam ayat 1 wajib:
   a. Selaras dengan Akta Pendirian IMF;
   b. Menghindari kerugian yang tidak perlu terkait kepentingan komersil, ekonomi, dan finansial dari Pihak lainnya;
   c. Tidak melebihi batasan yang diperlukan untuk menghadapi keadaan yang digambarkan dalam ayat 1;
   d. bersifat sementara dan dihentikan secara progresif seiring dengan situasi yang disebutkan dalam ayat 1 membaik;
   e. tidak memperlakukan Pihak lainnya kurang daripada non-Pihak dalam situasi yang serupa;

3. Pembatasan-pembatasan apapun yang diadopsi ataupun dipertahankan berdasarkan ayat 1, atau perubahan apapun di dalamnya, wajib segera diberitahukan ke Pihak lainnya.

PASAL 20

Tindakan Kehati-Hatian

1. Meskipun ada ketentuan lain dalam Persetujuan ini, salah satu Pihak wajib tidak boleh dicegah untuk melakukan tindakan dengan cara yang tidak diskriminatif terkait dengan Jasa Keuangan karena alasan kehati-hatian, termasuk tindakan untuk melindungi penanam modal, deposan, pemegang polis, atau mereka yang tugas fidusia nya dimiliki oleh perusahaan yang menyediakan jasa keuangan, atau untuk memastikan integritas dan stabilitas sistem keuangannya.

2. Ketika tindakan diambil oleh salah satu Pihak sebagaimana ayat 1 tidak sesuai dengan Persetujuan ini, mereka wajib tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghindari dari komitmen atau Pihak tersebut berdasarkan Persetujuan ini.

3. Tidak ada apapun dalam Persetujuan ini yang bisa ditafsirkan untuk mewajibkansalah satu Pihak untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan urusan dan rekening nasabah individual atau informasi rahasia atau informasi kepemilikan apa pun yang berada dalam kepemilikan entitas publik.

PASAL 21

Perubahan-perubahan

Sebagaimana disetujui antara para Pihak, perubahan-perubahan maupun penambahan-penambahan dapat dibuat terkait dengan Persetujuan ini, yang mana wajib dibuat dalam bentuk protokol dari Persetujuan ini dan wajib mulai berlaku sesuai dengan ayat 1 dari Pasal 22 Persetujuan ini. Protokol dimaksud wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL 22

Mulai Berlaku, Durasi, dan Pengakhiran

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku tiga puluh hari setelah tanggal pertukaran instrumen ratifikasi oleh para Pihak.

2. Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk periode (10) sepuluh tahun dan wajib terus berlaku setelahnya kecuali diakhiri sesuai dengan ayat 3.

3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini pada akhir periode sepuluh tahun pertama atau kapanpun setelahnya dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya satu tahun sebelumnya melalui jalur diplomatik.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan di bawah ini, diberi wewenang untuk menandatangani, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Bogor pada tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas dalam rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris. Semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam interpretasi ketentuan Persetujuan ini oleh para Pihak, maka naskah dalam bahasa inggris wajib berlaku.

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia

RETNO L. P. MARSUDI
MENTERI LUAR NEGERI

Untuk Pemerintah
Persatuan Emirat Arab

SULTAN BIN AHMED ALJABER
MENTERI NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

PROTOKOL

Saat penandatangan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia danPersatuan Emirat Arab untuk Peningkatan dan Perlidungan Penanaman Modal (setelah ini disebut sebagai "Persetujuan"), kedua Pemerintah telah menyetujui ketentuan-ketentuan dibawah ini yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari Persetujuan ini.

1. Dengan mengacu pada ayat 1 dari Pasal 1 (Definisi) dan ayat 2 dari Pasal 2 (Ruang Lingkup) Perjanjian ini :

   Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, "hukum dan peraturan perundang-undangannya" wajib mengacu kepada hukum penanaman modal dari Pihak tersebut.

2. Dengan mengacu pada ayat 1 dari Pasal 1 (Definisi) Persetujuan ini:

   Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa tujuan dari Persetujuan ini, *goodwill*, pangsa pasar atau hak tak berwujud lainnya yang serupa wajib tidak boleh dianggap sebagai penanaman modal.

3. Dengan mengacu pada ayat 1(1)(b) dari Pasal 1 (Definisi) Persetujuan ini:

   Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa tujuan dari perjanjian ini, istilah perusahaan wajib terbatas pada perusahaan dari penanam modal yang didirikan berdasarkan hukum dari negara tuan rumah dan berada di wilayah dari negara tuan rumah.

4. Dengan mengacu pada ayat 2(a) dari Pasal 1 (Definisi) Persetujuan ini:

   Dalam hal Indonesia, dipahami bahwa apabila perorangan memiliki kewarganegaraan ganda, yang bersangkutan wajib dianggap secara eksklusif sebagai warga negara di

negara tempat yang bersangkutan biasanya tinggal. Dan sebagai tambahan, apabila perorangan adalah warga negara dari kedua Pihak, maka yang bersangkutan akan dianggap menjadi warga negara dimana penanaman modalnya berada.

5. Dengan mengacu pada ayat 6(a) dari Pasal 2 (Ruang Lingkup) Persetujuan ini:

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa "Pengadaan Pemerintah" adalah proses dimana pemerintah memperoleh kegunaan atau memperoleh barang atau jasa, atau kombinasi keduanya, untuk tujuan pemerintah dan tidak untuk penjualan komersial atau penjualan kembali atau penggunaan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk penjualan komersial atau penjualan kembali.

6. Dengan mengacu pada ayat 6(b) dari Pasal 2(Ruang Lingkup) Persetujuan ini:

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa "jasa yang diberikan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah" berarti jasa apapun, yang tidak disediakan secara komersial maupun dalam persaingan dengan satu atau lebih pemasok jasa.

7. Dengan mengacu pada ayat 6(b) dari Pasal 2(Ruang Lingkup) Persetujuan ini:

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pihak manapun dibawah *Tax Convention.*

8. Dengan mengacu pada Pasal 5 (Peningkatan Penanaman Modal) dari Persetujuan ini: Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa pelanggaran terhadap sebuah kontrak wajib tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap Persetujuan ini.

9. Dengan mengacu pada Pasal 7 (Perlakuan *Most-Favoured-Treatment*) dan Pasal 8 (*National Treatment*) dari Persetujuan ini :

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa apakah perlakuan yang diberikan dalam "keadaan serupa" berdasarkan Pasal 7 (*Most Favoured Nation*) dan 8 (*National Treatment*) dari Persetujuan tersebut bergantung pada totalitas keadaan, termasuk apakah perlakuan yang relevan membedakan antara penanam modal dan penanaman modal berdasarkan tujuan kesejahteraan publik yang sah.

10. Dengan mengacu pada ayat 1 (*Chapeau*) dari Pasal 9 (Ekspropriasi) Persetujuan ini :

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami sebagai berikut :

a. tindakan atau serangkaian tindakan oleh salah satu Pihak tidak dapat dianggap sebagai ekspropriasi kecuali apabila eksprosiasi dimaksud melanggar hak atas benda berwujud atau tidak berwujud atau dalam suatu penanaman modal.

b. Pasal 9 (Ekspropriasi) dari Persetujuan mengamanatkan dua situasi. Yang pertama adalah ekspropriasi langsung, dimana sebuah penanaman modal dinasionalisasi atau sebaliknya diekspropriasi secara langsung melalui pemindahan formal atas azas hak ataupun penyitaan langsung.

c. Kondisi kedua yang dialamatkan oleh Pasal 9 (Ekspropriasi) dari Persetujuan adalah ekspropriasi secara tidak langsung, yang mana tindakan atau serangkaian tindakan oleh salah satu Pihak dilakukan tanpa pemindahan formal atas azas hak ataupun penyitaan langsung.

(1). Penentuan dari apakah suatu tindakan atau rangkaian tindakan oleh satu Pihak, dalam situasi fakta tertentu, merupakan ekspropriasi tidak langsung, memerlukan pemeriksaan kasus-per-kasus berdasarkan fakta yang dipertimbangkan, meliputi faktor-faktor antara lain:

a. Dampak ekonomi karena tindakan Pemerintah, meski faktanya sebuah tindakan ataupun rangkaian tindakan dari satu Pihak memiliki efek buruk pada nilai ekonomi suatu investasi, dengan sendirinya, tidak berarti bahwa pengambil-alihan tidak langsung telah terjadi;

b. sejauh mana tindakan pemerintah mengganggu, harapan investasi yang wajar yang timbul dari komitmen tertulis dari Pihak sebelumnya kepada penanam modal; dan

c. karakter dari tindakan Pemerintah.

11. Dengan mengacu pada ayat 1(c) dari Pasal 9 (Ekspropriasi):

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami di mana ada sengketa tentang apakah suatu tindakan pemerintah merupakan ekspropriasi tidak langsung sesuai Pasal 9 (Ekspropriasi) dari Persetujuan ini, fakta bahwa kompensasi belum dibayar sementara sengketa tersebut belum terselesaikan tidak membuat tindakan tersebut melanggar hukum jika kemudian ditemukan merupakan ekspropriasi tidak langsung dalam arti Pasal tersebut.

12. Dengan mengacu pada ayat 6 dari Pasal 9 (Ekspropriasi) dari Persetujuan ini:

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa istilah "pencabutan" dari hak kekayaan intelektual, termasuk pembatalan atau peniadaan dari hak-hak tersebut,

dan istilah "pembatasan" dari hak kekayaan intelektual termasuk pengecualian dari hak-hak tersebut.

13. Dengan mengacu pada huruf (g) dan (h) dari ayat 4 dari Pasal 11 (Pemindahan) dari Persetujuan ini:

Untuk kepastian yang lebih besar, maka dipahami bahwa situasi-situasi dalam huruf (g) dan (h) mengacu pada, atau berasal dari, situasi dimana penanaman modal dihentikan oleh penanam modal dan penanam modal gagal memenuhi kewajibannya sehubungan dengan huruf tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.

DIBUAT DI Bogor, Indonesia pada pada tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas dalam rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam interpretasi ketentuan Persetujuan ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia

RETNO L. P. MARSUDI
MENTERI LUAR NEGERI

Untuk Pemerintah
Persatuan Emirat Arab

SULTAN BIN AHMED ALJABER
MENTERI NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

اتفاقية بين حكومة جمهورية اندونيسيا
و حكومة دولة الامارات العربية المتحدة
لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

ان حكومة جمهورية اندونيسيا وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة (المشار اليهما هنا وفيما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين")؛

رغبة منهما في تعزيز تعاون اقتصادي أعظم بينهما فيما يتعلق بالاستثمارات التي يقوم مستثمرون من طرف متعاقد واحد في إقليم دولة الطرف المتعاقد الاخر؛

اعترافا منهما بأن تعزيز والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيؤدي إلى تحفيز الأنشطة التجارية ذات المنفعة المتبادلة وزيادة الرخاء في كلا الطرفين المتعاقدين؛

واعترافا منهما ان إطار عمل مستقر للاستثمار سيعظم من الاستخدام الفعال للموارد الاقتصادية وتحسين المستويات المعيشية في كلا الطرفين المتعاقدين؛

ويعيدان التأكيد على التزامهما لضمان تنمية الاستثمار ليساهم في التنمية المستدامة في كلا الطرفين المتعاقدين؛

اتفقا على ما يلي:

المادة 1

التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

1. يعني المصطلح استثمار جميع أنواع الأصول التي يتملكها بشكل مباشر او غير مباشر ويستثمرها مستثمرون من طرف متعاقد واحد في إقليم دولة الطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانينه وتشريعاته، وتشمل بالأخص:

أ) الأموال المنقولة وغير المنقولة وأيضا أي حقوق أخرى، مثل الرهونات، التعهدات، حق الاستعمال والحقوق المشابهة؛

ب) شركة، حصص، أسهم، والاشكال الأخرى من المشاركة في شركة؛

ج) سندات الدين، سندات، القروض والاشكال الأخرى من الديون، متضمنة القروض من مؤسسة دولة الى مؤسسة دولة؛

د) حقوق الملكية الفكرية والصناعية، المرتبطة بالاستثمار؛

هـ) المطالبات النقدية أو أي أصول أخرى أو أداء له قيمة اقتصادية؛ و

و) الحقوق الممنوحة بموجب قانون أو عقد مثل الامتيازات، التراخيص، الاذونات أو التصاريح.

المطالبات المالية التي تنطوي على نوع الفائدة المنصوص عليها في الفقرات (أ) الى (و) أعلاه لن تشمل:

1) العقود التجارية لبيع السلع أو الخدمات من قبل مواطن او شركة من طرف متعاقد الى مواطن او شركة في إقليم الطرف المتعاقد الاخر؛ أو

2) تمديد الائتمان المرتبط بصفقة تجارية مثل التمويل التجاري.

بهدف التأهل كاستثمار لأغراض هذه الاتفاقية، يجب ان تتوفر للأصل سمات الاستثمار، بما في ذلك مدة معينة، الالتزام برأس مال أو موارد أخرى، توقع الكسب او الأرباح، وتحمل المخاطر.

قرار التحكيم او أي قرار أو حكم صادر فيما يتعلق باستثمار لن يعتبر كاستثمار لأغراض هذه الاتفاقية.

2. يعني المصطلح "مستثمر من طرف متعاقد":

أ) أي شخص طبيعي يكون من مواطني ذلك الطرف المتعاقد وفقا لتشريعاته؛

ب) أي شخص اعتباري مؤسس او منظم وفقا لتشريعات ذلك الطرف المتعاقد والذي يقوم بعمليات تجارية ملموسة في إقليم دولة ذلك الطرف المتعاقد.

3. يعني المصطلح "اقليم":

أ) في حالة دولة الامارات العربية المتحدة: إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة، والبحر الإقليمي، والمجال الجوي والمساحات المغمورة التي تمارس عليها دولة الامارات العربية المتحدة حقوق سيادية وفقا للقانون الدولي وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة؛ بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة والبر الرئيسي والجزر تحت ولايتها القضائية فيما يتعلق بأي نشاط في المياه وقاع البحر وباطن الأرض فيما يتعلق بالاستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية بحكم قانونها والقانون الدولي.

ب) في حالة جمهورية اندونيسيا: فيما يتعلق بجمهورية إندونيسيا: الأقاليم الأرضية والبحر الإقليمي، والمياه الأرخبيلية، والمياه الداخلية، بما في ذلك قاع البحار وباطن

أرضها، والمجال الجوي فوق تلك الأراضي، فضلا عن الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، التي تمارس عليها إندونيسيا السيادة أو الحقوق السيادية أو الولاية، حسب التعريف الوارد في قوانينها، ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة في خليج مونتيغو، 10 ديسمبر 1982.

المادة 2

النطاق

1. تسري هذه الاتفاقية على التدابير المعتمدة او التي يطبقها طرف بدون أي تمييز ذات الصلة بـ:

أ) المستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر؛

ب) استثمارات المستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر.

2. تسري هذه الاتفاقية فقط على استثمارات مواطني او الأشخاص الاعتباريين من طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الاخر والتي تم السماح بها وفقا للقوانين والتشريعات ذات الصلة للطرف المتعاقد المستضيف. لمزيد من اليقين، تسري هذه الاتفاقية على الاستثمارات المنفذة في إقليم دولة طرف متعاقد وفقا لقوانينها وتشريعاتها من قبل مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ولكن لن تسري على أي نزاع قائم أو تمت تسويته قبل دخولها حيز النفاذ.

3. بالرغم من الفقرة 2:

أ) في حالة اندونيسيا: الموارد الطبيعية غير مشمولة بهذه الاتفاقية، مالم يقرر خلاف ذلك تحديداً بمرسوم من حكومة اندونيسيا.

ب) أي حقوق سواء منحت بموجب قانون او قرار اداري من قبل سلطة مختصة، أو بموجب عقد، باستثناء الامتيازات للبحث عن، استكشاف، استخراج أو استغلال الموارد الطبيعية. في حالة الامارات العربية المتحدة، الموارد الطبيعية غير مشمولة بهذه الاتفاقية.

4. بالرغم من الفقرة 1 من هذه المادة، فان احكام المواد 3 (الامتثال بالقوانين المحلية)، 4 (المسؤولية المجتمعية للشركات) و14 (حق التنظيم) تسري على المستثمرين من طرف متعاقد واستثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الاخر.

5. لمزيد من اليقين، تسري هذه الاتفاقية فقط على التدابير المتخذة من قبل طرف متعاقد التي تحدث او تتواجد بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لذلك الطرف المتعاقد.

6. لن تسري هذه الاتفاقية على:

ا) المشتريات الحكومية؛

ب) الخدمات المقدمة عند ممارسة سلطة حكومية من قبل الكيان او السلطة ذات العلاقة لطرف؛

ج) الإعانات او المنح التي توفرها سلطات طرف، وتشمل القروض المدعومة من الحكومة، الضمانات والتامين؛

د) التدابير الضريبية.

المادة 3

الامتثال بالقوانين والتشريعات المحلية

بدون الاخلال بهذه الاتفاقية، على المستثمر من طرف متعاقد واستثماراته الامتثال بجميع قوانين وتشريعات الطرف المتعاقد الاخر، حيث يتواجد الاستثمار، فيما يتعلق بالإنشاء، الاستحواذ، التوسعة، الإدارة، التشغيل وبيع او التصرف الاخر في مثل هذا الاستثمار.

المادة 4

المسؤولية المجتمعية للشركات

يقوم كل طرف متعاقد بتشجيع المؤسسات العاملة ضمن اقليمه بالإدخال الطوعي في سياساتهم الداخلية لتلك المعايير الدولية المعروفة، التوجهات والمبادئ الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات التي يؤيدها او يعتمدها ذلك الطرف المتعاقد.

المادة 5

تشجيع الاستثمارات

1. يقوم كل طرف متعاقد رهناً لسياسته العامة في مجال الاستثمار الأجنبي، بتشجيع استثمارات المستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر في إقليم دولته.
2. يقوم كل طرف متعاقد بالتأكيد على ان الالتزامات الناشئة من هذه الاتفاقية سيتم تنفيذها.

المادة 6

معاملة الاستثمارات

1. يقوم كل طرف متعاقد بمنح معاملة عادلة ومنصفة وحماية وأمن كاملين للمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر والى استثماراتهم المشمولة على اقليمه وفقا للفقرات 2 الى 4.
2. يعتبر ان طرف متعاقد قد أخل بالتزام المعاملة المنصفة والعادلة المشار اليها في الفقرة 1، حيث يشكل اجراء او سلسلة من الإجراءات:

أ) الحرمان من العدالة في الإجراءات القضائية الجنائية أو المدنية أو الإدارية؛

ب) مخالفة رئيسيه للأصول القانونية في الإجراءات القضائية او الإدارية؛

ج) تمييز مستهدف على أساس غير قانوني واضح، مثل الجنس أو العرق أو المعتقد الديني؛

د) المعاملة المسيئة، مثل الإكراه، وإساءة استخدام السلطة أو اجراء بسوء نية مماثل؛ أو

هـ) الاخلال بأي عناصر أخرى من الالتزام بالمعاملة العادلة والمنصفة التي اعتمدها الطرفين وفقا للفقرة 3 من هذه المادة.

3. لمزيد من اليقين، فان "الحماية والامن الكاملين" تشير الى التزامات طرف متعاقد للتصرف كما هو ضروري بشكل مناسب لحماية الامن المادي للمستثمرين والاستثمارات المشمولة والتي لا تخلق التزامات إضافية غير تلك التي يوفرها الى مواطنيه والاجانب الاخرين.

4. ان تحديد انه قد تم الاخلال بحكم اخر من هذه الاتفاقية او لاتفاقية دولية منفصلة لا يثبت لوحده انه قد تم الاخلال بهذه المادة

المادة 7

معاملة الدولة الأولى بالرعاية

1. يقوم كل طرف متعاقد بمنح استثمارات الطرف المتعاقد الاخر واستثماراتهم معاملة لا تقل افضلية عن تلك التي يمنحها، في ظروف مماثلة، الى مستثمرين من أي دولة ثالثة واستثماراتهم، فيما يتعلق بإدارة، عمل، تشغيل والتخلص من الاستثمارات.
2. لمزيد من اليقين، المعاملة المشار اليها في الفقرة 1 لا تشمل اليات حل النزاع، او أو مسائل إجرائية او قضائية.
3. لمزيد من اليقين، فان الالتزامات الموضوعية في اتفاقيات الاستثمار الدولية الأخرى كما هو مشار اليه في الفقرة 1، لا تشكل بنفسها "معاملة"، وبالتالي لا يمكن ان تؤدي الى اخلال بهذه المادة.
4. لا تفسر احكام هذه الاتفاقية على انها تلزم طرف متعاقد على ان يمد الى المستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر منافع أي معاملة، افضلية أو امتياز ناتج عن:

أ) العضوية في اتفاقية تكامل اقتصادي إقليمي او منظمة أو اتحاد جمركي قائم او مستقبلاً، الذي يكون أحد الطرفين المتعاقدين طرف او قد يصبح طرف فيها؛ أو

ب) أي اتفاقية دولية او ترتيب يتعلق كلياً او رئيسياً بالضرائب أو أي تشريع محلي يتعلق كلياً او رئيسياً بالضرائب.

المادة 8

المعاملة الوطنية

1. مع الخضوع لقوانينه وتشريعاتها، يقوم كل طرف متعاقد بمنح المستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر ولاستثماراتهم معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة الى مستثمريه واستثماراتهم، فيما يتعلق، بالإدارة، تسيير، تشغيل والتصرف في الاستثمارات. لمزيد من التأكيد، "مع الخضوع لقوانينه وتشريعاته" ستشمل قوانين وتشريعات "قائمة" ومستقبلية، بما فيها استمراريتها والتعديلات.
2. لمزيد من التأكيد، فان المعاملة الممنوحة من قبل طرف متعاقد بموجب الفقرة 1 تعني، فيما يتعلق بالمستوى الإقليمي لحكومة، معاملة لا تقل افضلية عن أكثر معاملة افضلية تمنح، في ظروف مماثلة، من قبل ذلك المستوى الإقليمي للحكومة الى استثمارات المستثمرين، من الطرف المتعاقد الذي تشكل جزء منه.

المادة 9

المصادرة

1. لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تأميم او مصادرة استثمار لمستثمر (المشار اليه هنا "المصادرة") من الطرف المتعاقد الاخر سواء بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق تدابير لها إثر مماثل للمصادرة او التأميم، فيما عدا:

أ) لأغراض عامة؛

ب) على أساس غير تمييزي؛

ج) دفع تعويض مناسب وفاعل وفقا للفقرتين 2 و3؛ و

د) وفقا للإجراءات القانونية.

2. يكون التعويض بموجب الفقرة 1 (ج) من هذه المادة مساوياً للقيمة السوقية للاستثمار المصادر مباشرة قبل حدوث المصادرة او المعرفة العامة بالمصادرة الوشيكة، ايهما يحدث اولاً. يستبعد من تقدير القيمة السوقية العادلة للاستثمار المصادرة أرباح المضاربة أو الأرباح غير المتوقعة يدعيها المستثمر. يكون التعويض قابل للتنفيذ، وقابلة للتحويل بحرية ودون أي تأخير لا مبرر له.

3. بالرغم من احكام الفقرتين 1 و2، أي تدبير للمصادر المباشرة ذات الصلة بالأراضي سيكون:

أ) لغرض وفق التشريع المحلي المطبق للطرف المتعاقد حيث يتواجد الاستثمار المصادر؛ و

ب) عند الدفع بموجب التشريع المحلي.

4. حيثما لم يمكن التحقق من القيمة السوقية العادلة، فان التعويض يحدد بطريقة عادلة تأخذ في الحسبان جميع العوامل ذات الصلة والظروف، مثل راس المال المستثمر، طبيعة ومدة الاستثمار، الاستبدال والقيمة الدفترية.

5. يكون للمستثمر من طرف متعاقد والمتأثر بالمصادرة التي يقوم بها الطرف المتعاقد الاخر، الحق في المراجعة الفورية لقضيته من قبل سلطة قضائية أو سلطة أخرى مستقلة ومختصة من الطرف المتعاقد المذكور اخراً.

6. لا تسري هذه المادة على اصدار التراخيص الإلزامية الممنوحة فيما يتعلق بالملكية الفكرية وفقا للقانون المحلي للدولة المستضيفة، او الى الأبطال، الحد، أو انشاء

حقوق الملكية الفكرية، الى الدرجة التي يكون فيها مثل هذا الإصدار، الإبطال، والحد، أو الإنشاء يتماشى مع القوانين المحلية للدولة المستضيفة.

المادة 10

التعويض عن الخسائر

1. عندما تتعرض استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين للخسائر بسبب الحرب أو نزاع مسلح أخر، ثورة، اضطرابات مدنية، حالة طوارئ وطنية، ثورة، شغب أو أحداث مشابهة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر فإنها تمنح فيما يتعلق بالاسترداد، التعويض أو التعويضات الأخرى، معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها إلى مستثمريه أو لمستثمرين من أي طرف ثالث، أيها أكثر رعاية.
2. بدون الاخلال بالفقرة 2 من هذه المادة، فان مستثمري طرف متعاقد الذين في أي من الحالات المشار اليها في تلك الفقرة الذين يعانون من خسائر في إقليم دولة الطرف المتعاقد الاخر الناتج عن تدمير استثماراتهم او جزء منها هناك من قبل قوات او سلطات المذكور اخراً، والذي لم يطلبه ضرورة الموقف، يمنحون استرداد او تعويض.

المادة 11

التحويلات

1. يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بجميع التحويلات المتعلقة باستثمار أن تتم بحرية وبدون تأخير الى وخارج اقليمها. تشمل هذه التحويلات:

أ) راس المال الاولي والمبالغ الإضافية للمحافظة على او زيادة استثمار؛

ب) العائدات؛

ج) العائدات من بيع جميع او أي جزء من الاستثمار او من التصفية الكلية او الجزئية للاستثمار؛

د) المدفوعات بموجب عقد، وتشمل اتفاقية قرض؛

ه) دخل الافراد العاملين من الخارج فيما يتعلق باستثمار في اقليمه؛ و

و) المدفوعات بموجب المادتين 9 (المصادرة) و10 (التعويض عن الخسائر) من هذه الاتفاقية.

2. يسمح كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالتحويلات ذات العلاقة باستثمار بعملة قابلة للتحويل بحرية في بسعر سوق الصرف السائد في تاريخ التحويل.

3. يسمح كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالعوائد العينية ذات العلاقة باستثمار كما هو مطلوب أو محدد في اتفاقية مكتوبة بين طرف متعاقد واستثمار لمستثمر من الطرف المتعاقد الآخر.

4. بالرغم من احكام الفقرات 1، 2 و3، يجوز لطرف متعاقد منع او تأخير او تعليق تحويل عن طريق التطبيق العادل، غير التمييزي وحسن النية لقوانينه ذات الصلة بـ:

أ) الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين؛

ب) إصدار، تداول أو التعامل في الأوراق المالية:

ج) الجرائم الجنائية أو الجزائية واسترداد عائدات الجريمة؛

د) الإبلاغ المالي أو الاحتفاظ بسجلات لعمليات التحويل عند الضرورة لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون أو السلطات التنظيمية المالية؛

هـ) ضمان الامتثال للأوامر أو الأحكام في الإجراءات القضائية أو الإدارية؛

و) الضمان الاجتماعي، التقاعد العام أو مخططات الادخار الإجباري؛

ز) استحقاقات إنهاء الخدمة للموظفين؛ أو

ح) شرط التسجيل واستيفاء الشكليات الأخرى المفروضة من البنك المركزي والسلطات الأخرى ذات الصلة لطرف متعاقد.

3. لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين كأعضاء في صندوق النقد الدولي بموجب مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي، بما فيه استخدام إجراءات الصرف التي تتفق مع مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي.

المادة 12

الحرمان من المنافع

1. يجوز لطرف متعاقد ان يحرم من منافع هذه الاتفاقية الى مستثمر من الطرف المتعاقد الاخر الذي يكون شخص اعتباري لمثل هذا الطرف المتعاقد الاخر والى استثمارات ذلك المستثمر إذا امتلك او تحكم بالشخص الاعتباري اشخاص من

طرف غير متعاقد ولم يكن الطرف القائم بالحرمان يقيم علاقات دبلوماسية مع الطرف غير المتعاقد.

2. يجوز لطرف متعاقد ان يحرم من منافع هذه الاتفاقية لمستثمر الذي هو شخص اعتباري من الطرف المتعاقد الآخر الى استثمارات ذلك المستثمر إذا لم يكن للشخص الاعتباري أنشطة تجارية كبيرة في اقليم دولة الطرف المتعاقد الاخر وامتلك او تحكم بالشخص الاعتباري اشخاص من طرف غير متعاقد، أو من الطرف المتعاقد القائم بالحرمان.
3. يجوز لطرف متعاقد ان يحرم من منافع هذه الاتفاقية الى مستثمر الذي هو شخص طبيعي من الطرف المتعاقد الاخر والى استثمارات ذلك المستثمر إذا ما استحوذ الشخص الطبيعي على جنسيته/! لغرض رئيسي للحصول على منافع هذه الاتفاقية والتي لن تتوفر خلاف ذلك لمثل هذا المستثمر.
4. يجوز لطرف متعاقد الحرمان من منافع هذه الاتفاقية الى مستثمر الذي هو شخص طبيعي من الطرف المتعاقد الاخر والى استثمارات ذلك المستثمر إذا كان الشخص الطبيعي هو أيضا من مواطني الطرف المتعاقد الأول.
5. يجوز لطرف متعاقد ان يحرم من منافع هذه الاتفاقية الى مستثمر من الطرف المتعاقد الاخر الذي يكون شخص اعتباري لمثل هذا الطرف المتعاقد الاخر والى استثمارات ذلك المستثمر إذا امتلك او تحكم بالشخص الاعتباري اشخاص من طرف غير متعاقد وكان الطرف المتعاقد القائم بالحرمان يعتمد او يحتفظ بتدابير فيما يتعلق بالطرف غير المتعاقد أو شخص من الطرف الغير المتعاقد التي تحظر التعامل مع الشخص الاعتباري او التي قد تخل او تتحايل عليها إذا ما منحت منافع هذه الاتفاقية الى الشخص الاعتباري او الى استثماراته.

المادة 13

حظر متطلبات الأداء

1. لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض او إلزام مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر أي متطلبات أداء فيما يتعلق بإدارة، تسيير او تشغيل استثماراتهم في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
2. لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض او إلزام المتطلبات التالية، أو فرض الالتزام أو التعهد، فيما يتعلق بإدارة، تسيير او تشغيل استثمار لمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر في اقليمه:
   أ) لتصدير مستوى معين أو نسبة مئوية من البضائع؛
   ب) لتحقيق مستوى معين أو نسبة مئوية من المحتوى المحلي؛
   ج) لشراء أو استخدام أو إعطاء تفضيل لسلعة أنتجت في اقليمه، أو شراء سلعة أو خدمة من أي شخص في اقليمه؛
   د) ربط حجم أو قيمة الواردات إلى حجم أو قيمة الصادرات او مبلغ لتدفقات العملات الأجنبية المرتبطة بهذا الاستثمار.
3. لا تخل الفقرتين 1 و2 من هذه المادة بالقوانين المعمول بها وتشريعات الطرف المتعاقد المستضيف.
4. لا تسري هذه المادة على تسوية النزاع بين مستثمر ودولة بموجب المادة 17 من هذه الاتفاقية.
5. فيما يتعلق بهذه المادة فان الإجراءات التعسفية أو التمييزية لا يمكن تطبيقها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.

المادة 14

حق التنظيم

1. لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على انه يمنع طرف متعاقد من اعتماد، الحفاظ أو تنفيذ أي تدابير التي غير ذلك تتوافق مع هذه الاتفاقية والتي تعتبرها مناسبة لـ:

أ) ضمان الامتثال للقوانين واللوائح للطرف المتعاقد التي لا تتعارض مع هذه الاتفاقية؛

ب) حماية البيئة أو الإنسان، أو الحياة النباتية أو الصحة؛

ج) تنظيم حفظ الموارد الطبيعية الناضبة الحية أو غير الحية؛ أو

د) ضمان الحفاظ على أو استعادة السلم أو الأمن القومي، أو حماية مصالحه الأمنية الأساسية.

2. أن الحفاظ على أو إنفاذ هذه التدابير يخضع لشرط ألا تطبق بطريقة تعسفية أو غير مبررة أو لا تشكل قيداً مقنعا على الاستثمارات من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 15

الشفافية

1. على كل من الطرفين المتعاقدين السعي لجعل قوانينه وتشريعاته متاحة للجمهور وأيضا الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرف المتعاقد طرفاً فيها، فيما يتعلق باي مسالة تشملها هذه الاتفاقية.

2. على كل من الطرفين المتعاقدين، عند الطلب من قبل الطرف المتعاقد الاخر، وخلال فترة زمنية مناسبة، توفير المعلومات الى الطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بالمسائل المشار اليها في الفقرة 1.
3. عند طرح او تغيير قوانينه وتشريعاته التي تؤثر بشكل واضح على تطبيق وتشغيل هذه الانفاقية، على كل من الطرفين المتعاقدين السعي لاتخاذ تدابير مناسبة لتمكين الأشخاص المهتمين للاطلاع على مثل هذا الطرح او التغيير.

المادة 16

الاحلال

1. إذا قام طرف متعاقد او وكالة لطرف متعاقد بالسداد الى مستثمر من ذلك الطرف بموجب ضمان، عقد تامين او شكل اخر من التعويض الذي منحته لخطر غير تجاري فيما يتعلق باستثمار، فان الطرف المتعاقد الاخر يعترف بالإحلال أو نقل أي حق أو مطالبة فيما يتعلق بمثل هذا الاستثمار. الحق المحول او المنقول لن يكون أكبر من الحق الأصلي او مطالبة المستثمر. ومع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة اعتراف الطرف المتعاقد الأخير بأسس أي قضية او مبلغ أي مطالبة ناشئة عن ذلك.
2. حيثما يقوم طرف متعاقد او وكالة بالسداد الى مستثمر من ذلك الطرف المتعاقد وتولى حقوق ومطالبات المستثمر، فانه لا يجوز للمستثمر، مالم يؤذن له بالتصرف نيابة عن الطرف المتعاقد او الوكالة القائمة بالسداد، متابعة هذه الحقوق والمطالبات ضد الطرف المتعاقد الاخر.

3. يحدث الاحلال بعد الموافقة المسبقة للطرف المتعاقد المستضيف الذي يقوم على اقليمه الاستثمار، إذا ما كانت هذه الموافقة مطلوبة من قبل ذلك الطرف المتعاقد المستضيف.

المادة 17

تسوية النزاعات الاستثمارية بين المستثمر والطرف المتعاقد الاخر

1. تسري هذه المادة على النزاعات القانونية بين مستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الاخر الناتجة عن استثمار للمذكور اولاً في إقليم دولة الطرف المتعاقد الأخير. يتعلق مثل هذا النزاع بالإخلال المزعوم بالتزام للطرف المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية والذي تسبب بخسائر او اضرار الى المستثمر من الطرف المتعاقد الاخر.
2. لبدأ المشاورات، على المستثمر ان يسلم الى الطرف المتعاقد اخطار كتابي. على الاخطار ان يحدد تفاصيل النزاع مثل:
   أ) اسم وعنوان المستثمر المتنازع؛
   ب) احكام هذه الاتفاقية المزعوم انه تم الاخلال بها؛ و
   ج) الأسس الواقعية والقانونية للادعاء.
3. إذا لم يكن من الممكن حل النزاع وديا خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الاخطار الكتابي، يقوم المستثمر المتنازع بتقديم النزاع الى لجنة مشتركة متخصصة برئاسة مشتركة من كبار المسؤولين من كلا الطرفين المتعاقدين بحضور المستثمر المتنازع او من ينوب عنه، لتسوية النزاع بهدف تحقيق حل متفق عليه. يكون قرار اللجنة

المشتركة نهائياً وملزم ويستبعد حق المستثمر لتقديم النزاع في أي محافل أخرى. في حال عدم قدرة اللجنة المشتركة على اصدار قرارها خلال 6 أشهر من تاريخ الاجراء. يجوز للمستثمر المتنازع تقديم النزاع الى أحد المحافل التالية:

أ) من قبل محكمة مختصة للطرف المتعاقد الذي يقوم على اقليمه الاستثمار؛ أو

ب) التحكيم من قبل المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية (ICSID)، المنشأ بموجب اتفاقية تسوية النزاعات الاستثمارية بين الدول ومواطني الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 بشرط ان يكون كلا الطرفين المتعاقدين طرفاً في الاتفاقية المذكورة؛ أو

ج) المرافق الإضافية لمركز تسوية النزاعات الاستثمارية، إذا ما كان فقط أحد الطرفين المتعاقدين من الموقعين على اتفاقية واشنطن؛ أو

د) التحكيم امام محكمة تتألف من ثلاث محكمين وفقا لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة القانون التجاري الدولي (UNCITRAL) كما عدلت في عام 2010.

4. يكون الحكم نهائي وملزم. يؤكد كل من الطرفين المتعاقدين على الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لقوانينه وتشريعاته وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

5. النزاعات التي تنشأ من أي عقد مبرم بين المستثمر وكيان معين لطرف متعاقد او حكومته المحلية بشأن استثمار هؤلاء المستثمرين يتم تسويته وفقا لإجراءات تسوية النزاعات المنصوص عليها فيه.

6. في حالة تقديم نزاع استثماري للحل بموجب أحد المحافل المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة، يستخدم المحفل المحدد من قبل طرفي النزاع مع استبعاد المحفلين الأخرين فيما يتعلق بالنزاعات ذات نفس الموضوع او المطابقة.

7. لا يجوز تقديم نزاع للحل عن طريق التحكيم بموجب الفقرة 3 من هذه المادة إذا ما نقضت أكثر من ثلاث سنوات من التاريخ الذي تحصل فيه المستثمر اولاً او كان يجب ان يتحصل فيه على المعرفة بالإخلال المزعوم والضرر أو الخسارة التي تكبدها المذكور اخراً.

المادة 18

تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

1. أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب، وبأقصى حد ممكن، ان يتم تسويته عن طريق التشاور و/أو القنوات الدبلوماسية الاخرى.
2. إذا لم يستطع الطرفين المتعاقدين التوصل الى اتفاق خلال ست (6) أشهر تالية للتاريخ الذي طلبت فيه المشاورات و/أو القنوات الدبلوماسية الأخرى من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، فان النزاع بناء على طلب الطرف المتعاقد، يقدم الى محكمة تحكيم. في غياب اتفاق بين الطرفين المتعاقدين على عكس ذلك، تعقد الإجراءات التحكيمية وفقا للقواعد الاختيارية للمحكمة الدائمة للتحكيم لتحكيم النزاعات بين دولتين، فيما عدا ما هو معدل من قبل الطرفين المتعاقدين أو هذه الاتفاقية.
3. الا إذا ما اتفق الطرفين المتعاقدين على غير ذلك، يتم تسوية النزاع عن طريق محكمة تحكيم تتألف من ثلاث محكمين. يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم خلال فترة شهرين اثنين من تاريخ تلقي أي من الطرفين المتعاقدين من الطرف

المتعاقد الاخر طلب تحكيم. يقوم المحكمان المختاران سوية وفي خلال فترة شهرين اثنين إضافية، باختيار محكم ثالث من مواطني دولة ثالثة. متى ما تمت الموافقة على المحكم الثالث من قبل الطرفين المتعاقدين، فانه يعين كرئيس للمحكمة.

4. إذا لم ينم اختيار أي عضو في محكمة التحكيم خلال الفترات الزمنية المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة، فانه بناء على دعوة أي من الطرفين المتعاقدين يقوم الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم، بناء على تقديره، بتعيين المحكم او المحكمين الذين لم يتم تعيينهم بعد.
5. تعقد إجراءات التحكيم في لاهاي، هولندا.
6. تصدر محكمة التحكيم قراراها بأغلبية الأصوات. ويكون القرار نهائي وملزم على كلا الطرفين المتعاقدين.
7. تتحمل النفقات المتكبدة للمحكمين، والتكاليف الأخرى الخاصة بالإجراءات، بنفس القدر من الطرفين. التحكيم، ومع ذلك، يجوز لمحكمة التحكيم في تقديرها، ان تقرر أن نسبة أعلى من التكاليف تدفع من قبل أحد الطرفين المتعاقدين.

المادة 19

تدابير ميزان المدفوعات

1. يجوز للطرف المتعاقد بطريقة غير تمييزية اعتماد أو الإبقاء على القيود المفروضة على المدفوعات أو التحويلات المتصلة بالاستثمارات في مثل الحالات التالية:

أ) في حالة اختلال خطير في ميزان المدفوعات، والصعوبات المالية الخارجية أو التهديد بذلك؛ أو

ب) في الحالات حيث، في ظروف استثنائية، قد تؤدي تحركات راس امال أو تهدد ان تؤدي الى مصاعب جدية لإدارة الاقتصاد الكلي، بالأخص، السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف.

2. على القيود المشار اليها في الفقرة 1 أن:

أ) تتوافق مع مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي؛

ب) تتجنب الضرر غير الضروري للمصالح التجارية، الاقتصادية والمالية للطرف المتعاقد الاخر

ج) لا تتجاوز التدابير الضرورية للتعامل الظروف الموصوفة في الفقرة 1

د) تكون مؤقتة والتخلص منها تدريجيا مع تحسن الموقف الموضح في ال فقرة1

ه) ان لا تعامل الطرف المتعاقد الاخر بشكل اقل افضلية من طرف غير متعاقد في ظروف مشابهة

3. اي قيود تعتمد او يحافظ عليها بموجب الفقرة 1، او اي تغييرات فيها، يجب ان يتم الاخطار بها فوريا الى الطرف المتعاقد الاخر.

المادة 20

التدابير التحوطية

1. بالرغم من اي احكام اخرى في هذه الاتفاقية، لن يمنع طرف متعاقد من انخاذ تدابير بطريقة غير تمييزية ذات صلة بالخدمات المالية لأسباب تحوطية. وتشمل التدابير لحماية المستثمرين، المودعين، حاملي السندات او الاشخاص الذين لهم

واجابات ائتمانية مستحقة من قبل مشروع يقدم خدمات مالية، او لضمان سلامة واستقرار نظامه المالي.

2. حيثما لم تكن التدابير المتخذة من قبل طرف متعاقد وفق الفقرة 1 لا تتوافق مع الاتفاقية، فإنها لن تستخدم كوسيلة لتجنب الارتباطات او الالتزامات لطرف متعاقد بموجب هذه الاتفاقية.
3. لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفسر على انه يتطلب من طرف متعاقد افشاء معلومات تتعلق بشؤون وحسابات العملاء الافراد او اي معلومات سرية او معلومات ملكية في حيازة مؤسسات عامة.

المادة 21

التعديلات

كما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين فان يجوز اجراء تعديلات واضافات الى هذه الاتفاقية، والتي ستبرم بشكل بروتوكول الى هذه الاتفاقية وتدخل حيز النفاذ وفقا للفقرة 1 من المادة 22 من هذه الاتفاقية. يشكل هذا البروتوكول جزء مكمل من هذه الاتفاقية.

المادة 22

الدخول حيز النفاذ، المدة والانهاء

1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل ادوات التصديق من قبل الدولتين المتعاقدتين.

2. تظل هذه الاتفاقية سارية النفاذ لفترة عشر (10) سنوات وتظل سارية النفاذ بعد ذلك مالم يتم انهائها وفقا للفقرة 3.
3. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين انهاء هذه الاتفاقية بنهاية فترة العشر سنوات الاولية او في اي وقت بعد ذلك بإرسال الى الطرف المتعاقد الاخر اخطار مسبق مدته سنة واحدة عن طريق القنوات الدبلوماسية.

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية

حررت من نسختين في مدينة بوجور اندونيسيا بتاريخ 24 يوليو 2019 باللغات الاندونيسية والعربية والانجليزية، ويكون لكلا النصين حجية متساوية. وفي حالة الاختلاف في تفسير احكام هذه الاتفاقية يسود النص الانجليزي.

عن حكومة	عن حكومة
جمهورية اندونيسيا	دولة الإمارات العربية المتحدة
ريتنو. ل. ب مارسودي	د. سلطان بن أحمد الجابر
وزير الخارجية	وزير دولة

REPUBLIK INDONESIA

بروتوكول

عند التوقيع على اتفاقية بين حكومة جمهورية اندونيسيا وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات (المشار اليها هنا وفيما يلي بـ "الاتفاقية")، وافقت كلا الحكومتان على ان الاحكام التالية ستشكل جزء لا يتجزأ من الاتفاقية.

1. بالإشارة الى الفقرة 1 من المادة 1 (التعريفات) والفقرة 2 من المادة 2 (النطاق) من الاتفاقية:

لمزيد من التأكيد، فانه من المتفاهم عليه ان الاستثمارات التي يقوم مستمرون من طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر "قوانين وتشريعات" تشير الى قانون الاستثمار لذلك الطرف المتعاقد.

2. بالإشارة الى الفقرة 1 من المادة 1 (تعريفات) من الاتفاقية:

لمزيد من التأكيد، انه من المتفاهم لأغراض هذه الاتفاقية، الشهرة، حصة السوق وغيرها من الحقوق غير الملموسة المشابهة لن تعتبر كاستثمار.

3. بالإشارة الى الفقرة 1(1) (ب) من المادة 1 (تعريفات) من هذه الاتفاقية:

لمزيد من التأكيد، انه من المتفاهم عليه لأغراض هذه الاتفاقية، ان المصطلح شركة سيقتصر على شركة لمستثمر منشأة بموجب قوانين الدولة المستضيفة وموقعها في اقليم الدولة المستضيفة.

4. بالإشارة الى الفقرة 2(أ) من المادة 1 (تعريفات) من هذه الاتفاقية:

في حالة اندونيسيا، من المتفاهم عليه انه إذا استحوذ شخص طبيعي على جنسية مزدوجة، فانه/ا يعتبر حصريا من مواطني الدولة التي يقيم او تقيم بها عادة. وبالإضافة، إذا ما كان شخص طبيعي من مواطني كلا الطرفين المتعاقدين فانه/ا يعتبر من مواطني الطرف المتعاقد الذي يتواجد به استثماره.

5. بالإشارة الى الفقرة 6 (أ) من المادة 2 (النطاق) من هذه الاتفاقية:

لمزيد من التاكيد، انه من المتفاهم عليه ان "المشتريات الحكومية" تعني العملية التي عن طريقها تمتلك او تستخدم او تستحوذ الحكومة على سلع او خدمات، او اي مزج منها، لأغراض حكومية وليس بهدف البيع التجاري او اعادة البيع او الاستخدام في الانتاج او التوزيد للسبع والخدمات للبيع او اعادة البيع التجاري.

6. بالإشارة الى الفقرة 6 (ب) من المادة 2 (النطاق) من هذه الاتفاقية:

لمزيد من التأكيد، فانه من المتفاهم عليه ان " الخدمات المقدمة عند ممارسة سلطة حكومية " تعني أي خدمة، والتي يتم توفيرها ليس على أساس تجاري، ولا تنافسي مع مورد خدمة واحد أو أكثر.

7. بالإشارة الى الفقرة 6 (ب) من المادة 2 (النطاق) من هذه الاتفاقية:

لمزيد من التأكيد، فانه من المتفاهم عليه ان الاتفاقية لن تؤثر على حقوق والتزامات أي من الطرفين المتعاقدين بموجب أي اتفاقية ضريبية.

8. بالإشارة الى المادة 5 (تشجيع الاستثمارات) من الاتفاقية:

لمزيد من التأكيد، فانه من المتفاهم عليه ان الاخلال بعقد لن يعتبر كإخلال بهذه الاتفاقية

9. بالإشارة الى المادة 7 (معاملة الدولة الأولى بالرعاية) والمادة 8 (المعاملة الوطنية) من هذه الاتفاقية:

لمزيد من التأكيد، فانه من المتفاهم عليه أنه إذا ما كانت المعاملة الممنوحة "ظروف مماثلة" بموجب المادتين 7 (معاملة الدولة الأولى بالرعاية) و8 (المعاملة الوطنية) من هذه الاتفاقية يعتمد على مجمل هذه الظروف، بما في ذلك ما إذا كانت المعاملة ذات الصلة تميز بين المستثمرين أو الاستثمارات على أساس أهداف مصلحة عامة مشروعة.

10. بالإشارة الى الفقرة 1 (المقدمة) من المادة 9 (المصادرة) من هذه الاتفاقية:

لمزيد من التأكيد، فانه من المتفاهم عليه ما يلي:

أ) لا يمكن أن يشكل إجراء أو سلسلة من الإجراءات من طرف متعاقد مصادرة إلا إذا تعارضت مع حق ملكية ملموس او غير ملموس أو في الاستثمار.

ب) المادة 9 (المصادرة) من هذه الاتفاقية تتناول حالتين اثنين. الأولى هي المصادرة المباشرة، التي يتم فيها تأميم أو غير ذلك المصادرة المباشرة عن طريق التحويل الرسمي للملكية او المصادرة الواضحة.

ج) الحالة الثانية التي تتناولها المادة 9 (المصادرة) من هذه الاتفاقية، هي المصادرة غير المباشرة، التي يتم فيها اتخاذ اجراء او سلسلة من الإجراءات من قبل طرف متعاقد بدون التحويل الرسمي للملكية او المصادرة الواضحة.

(1) ان تحديد إذا ما كان الاجراء او سلسلة الإجراءات التي يتخذها طرف متعاقد، في موقف محدد، يشكل مصادرة غير مباشرة، يتطلب اجراء تحقيق لحالة بحالة، قائم على الحقائق والذي يضع في الاعتبار ضمن عوامل أخرى:

(أ) الأثر الاقتصادي للإجراء الحكومي، وعلى الرغم من حقيقة أن إجراء أو سلسلة من الإجراءات التي يتخذها طرف متعاقد لها أثر سلبي على القيمة الاقتصادية للاستثمار، لوحده، لا يثبت حدوث مصادرة غير مباشرة؛

(ب) مدى تداخل اجراء الحكومة مع توقعات الاستثمار المميزة والمعقولة الناشئة عن الالتزام السابق الكتابي لطرف متعاقد مع المستثمر؛ و

(ج)صفة الاجراء الحكومي.

11.بالإشارة الى الفقرة 1(ج) من المادة 9 (المصادرة):

لمزيد من التأكيد، فانه من المتفاهم عليه انه حيثما كان هناك نزاع حول ما إذا كان إجراء الحكومة يصل الى نزع الملكية غير المباشر بالمعنى المقصود في المادة 9 (المصادرة) من الاتفاقية، فان حقيقة أن التعويض لم يدفع في حين أن النزاع لم يحل لا يجعل هذا الاجراء غير مشروع، إذا ما تبين انها في وقت لاحق تشكل مصادرة غير مباشرة بالمعنى المقصود من هذه المادة.

12.بالإشارة الى الفقرة 6 من المادة 9 (المصادرة) من هذه الاتفاقية:

لمزيد من التأكيد، فانه من المتفاهم عليه أن مصطلح "إبطال" حقوق الملكية الفكرية ويتضمن إلغاء أو إبطال تلك الحقوق، ومصطلح "الحد من" حقوق الملكية الفكرية يتضمن استثناءات لتلك الحقوق.

13.بالإشارة الى الفقرات الفرعية (ز) و (ح) من الفقرة 4 من المادة 11 (التحويلات) من هذه الاتفاقية:

لمزيد من اليقين، فانه من المتفاهم عليه ان المواقف بموجب الفقرات الفرعية (ز) و (ح) تشير الى، او تنشأ من، موقف يتم فيه انهاء استثمار من قبل مستثمر ولم يستطع المستثمر الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بهذه الفقرات الفرعية.

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول بالتوقيع على هذا البروتوكول.

حررت من نسختين في بوجور اندونيسيا بتاريخ 24 يوليو 2019 باللغات الاندونيسية والعربية والانجليزية، وبكون لكلا النصين حجية متساوية. وفي حالة الاختلاف في تفسير احكام هذه الاتفاقية يسود النص الانجليزي.

عن حكومة	عن حكومة
جمهورية اندونيسيا	دولة الإمارات العربية المتحدة
رتنو . ل . ب مارسودي	د. سلطان بن أحمد الجابر
وزير الخارجية	وزير دولة

REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES
FOR THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of United Arab Emirates (hereinafter referred to as the "Contracting Parties");

DESIRING to promote greater economic co-operation between them with respect to investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the state of the other Contracting Party;

RECOGNIZING that the promotion and reciprocal protection of such investments will be conducive to the stimulation of mutually-beneficial business activities and to the increase of prosperity in both Contracting Parties

RECOGNIZING that a stable framework for investment will maximize effective utilization of economic resources and improving living standards in both Contracting Parties;

REAFFIRMING their commitment to ensure the development of investment in such a way as to contribute to sustainable development in both Contracting Parties;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term investment means every kind of asset which is owned directly or indirectly and invested by investors of a Contracting Party in the territory of the state of the other Contracting Party in accordance with its laws and regulations, including in particular:
   a. movable and immovable property as well as any other rights, such as mortgages, pledges, usufructs and similar rights;
   b. a company, shares, stocks, and other forms of participation in a company;
   c. debentures, bonds, loans and other forms of debt, including loans from state enterprise to state enterprise;
   d. intellectual and industrial property rights, which are related to the investment;
   e. claims to money or any other assets or performance having an economical value; and
   f. rights conferred by law or contract such as concessions, licenses, authorization or permits.

   Claims to money involving the kind of interest set out in subparagraphs (a) to (f) above shall not include:
   i. commercial contracts for the sale of goods or services by a national or a company of a Contracting Party to a national or a company in the territory of the other Contracting Party; or
   ii. the extension of credit in connection with commercial transaction such as trade financing.

In order to qualify as an investment for the purposes of this Agreement, an asset must have the characteristics of an investment, including certain duration, commitment of capital or other resources, the expectations of gain or profit, and the assumption of risk.

The arbitration award or any order or judgment rendered with regard to the investment shall not be considered as investment for the purposes of this Agreement.

2. The term "investor" of a Contracting Party means:

a. any natural person who is a national of that Contracting party in accordance with its legislation;
b. any legal person constituted or organized in accordance with the legislation of that Contracting Party and engaged in substantive business operations in the territory of the state of that Contracting Party.

3. The term "territory" shall mean:
   a. in respect of the Republic of Indonesia: the land territories, territorial sea, archipelagic waters, internal waters, including sea-bed and subsoil thereof, and airspace over such territories, as well as continental shelf and exclusive economic zone, over which Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction, as defined in its laws, and in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea, done at Montego Bay, December 10, 1982.
   b. in respect of the United Arab Emirates: the territory of the United Arab Emirates, its territorial sea, airspace and submarine areas over which the United Arab Emirates exercises in accordance with international law and the law of United Arab Emirates sovereign rights; including the Exclusive Economic Zone and the mainland and islands under its jurisdiction in respect of any activity carried on in its water, seabed and subsoil in connection with the exploration for or the exploitation of the natural resources by virtue of its law and international law.

ARTICLE 2

Scope

1. This Agreement shall apply to measures adopted or maintained by a Contracting Party without any discrimination relating to:
   a. investors of the other Contracting Party;
   b investments of investors of the other Contracting Party.

2. This Agreement shall only apply to investments by nationals or by legal persons of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party which has been granted admission in accordance with the respective laws and regulations of the host Contracting Party. For greater certainty, this Agreement shall apply to investments made in the territory of the state of a Contracting Party in accordance with its laws and regulations by investors of the other Contracting Party before or after the entry

into force of this Agreement, but shall not apply to any dispute that exists or has been settled before its entry into force.

3. Notwithstanding paragraph 2:
   a. in the case of Indonesia, natural resources shall not be covered by this Agreement, unless otherwise specifically decided by decree of the Government of Indonesia.
   b. Any rights whether conferred by law or an administrative act by a competent State authority, or by contract, excluding concessions to search for, explore, extract or exploit natural resources. In the case of the United Arab Emirates, natural resources shall not be covered by this Agreement.

4. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles 3 (Compliance with Domestic Law), 4 (Corporate Social Responsibility) and 14 (Right to Regulate) shall apply to investors of a Contracting Party and their investments in the territory of the other Contracting Party.

5. For greater certainty, this Agreement shall only apply to measures by a Contracting Party that take place or exist after the date of entry into force of this Agreement for that Contracting Party.

6. This Agreement shall not apply to:
   a. government procurement;
   b. services supplied in the exercise of governmental authority by the relevant body or authority of a Contracting Party;
   c. subsidies or grants provided by authorities of a Contracting Party, including government-supported loans, guarantees, and insurance;
   d. taxation measures.

ARTICLE 3

Compliance with Domestic Laws and Regulations

Without prejudice to this Agreement, an investor of a Contracting Party and its investment shall comply with all laws and regulations of the other Contracting Party, where the investment is located, concerning the establishment, acquisition, expansion, management, operation, and sale or other disposition of such investment.

ARTICLE 4

Corporate Social Responsibility

Each Contracting Party shall encourage enterprises operating within its territory to voluntarily incorporate into their internal policies those internationally recognised standards, guidelines, and principles of corporate social responsibility that have been endorsed or are supported by that Contracting Party.

ARTICLE 5

Promotion of Investments

1. Each Contracting Party shall, subject to its general policy in the field of foreign investment, promote in its state territory investments by investors of the other Contracting Party.
2. Each Contracting Party shall ensure that its obligation arising out of this Agreement shall be implemented.

ARTICLE 6

Treatment of Investments

1. Each Contracting Party shall accord fair and equitable treatment and full protection and security to investors of the other Contracting Party and their covered investment in its territory in accordance with paragraphs 2 to 4.
2. A Contracting Party breaches the obligation of fair and equitable treatment as referred to in paragraph 1 where a measure or series of measures constitutes:
   a. denial of justice in criminal, civil or administrative adjudicative proceedings;
   b. fundamental breach of due process in judicial and administrative proceedings;
   c. targeted discrimination on manifestly wrongful grounds, such as gender, race or religious belief;
   d. abusive treatment, such as coercion, abuse of power or similar bad faith conduct; or
   e. a breach of any further elements of the fair and equitable treatment obligation adopted by the Parties in accordance with paragraph 3 of this Article.
3. For greater certainty, "full protection and security" refers to the Contracting Party's obligations to act as may be reasonably necessary to protect physical security of

investors and covered investments that do not create additional obligations other than those which it offers to its own national and other aliens.

4. A determination that there has been a breach of another provision of this Agreement or of a separate international agreement does not itself establish that there has been a breach of this Article.

ARTICLE 7

Most-Favoured-Nation Treatment

1. Each Contracting Party shall accord to investors of the other Contracting Party and to their investments treatment no less favourable than that it accords in like circumstances, to investors of any third state and their investments, in relation to the management, conduct, operation and disposal of investments.
2. For greater certainty, treatment referred to in paragraph 1 shall not encompass dispute resolution mechanisms, or any procedural or judicial matters.
3. For greater certainty, substantive obligations in other international investment treaties as referred to in paragraph 1, do not in themselves constitute "treatment", and thus cannot give rise to a breach of this Article.
4. The provisions of this Agreement shall not be construed so as to oblige a Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from:
   a. membership of any existing or future regional economic integration agreement or organization or customs union of which one of the Contracting Parties is or may become a party; or
   b. any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation or any domestic legislation relating wholly or mainly to taxation

ARTICLE 8

National Treatment

1. Subject to its laws and regulations, each Contracting Party shall accord to investors of the other Contracting Party and to their investments treatment no less favourable that it accords, in like circumstances, to its own investors and their investments, in relation to the management, conduct, operation and disposal of investments. For greater certainty, "subject to its laws and regulations" shall include "existing" and future laws and regulations, including their continuation and amendment.

2. For greater certainty, the treatment to be accorded by a Contracting Party under paragraph 1 means, with respect to regional level of government, treatment no less favourable than the most favourable treatment accorded, in like circumstances, by that regional level of government to investors, and to investments of investors, of the Contracting Party of which it forms a part.

ARTICLE 9
Expropriation

1. Neither Contracting Party may nationalize or expropriate an investment of an investor of the other Contracting Party either directly or indirectly through measures having an effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter "expropriate"), except:
   a. for public purposes;
   b. in a non-discriminatory basis;
   c. on payment of prompt, adequate and effective compensation in accordance with paragraphs 2 and 3; and
   d. in accordance with due process of law.

2. The compensation under paragraph 1 (c) of this Article shall be equivalent to the market value of the expropriated investment immediately before the expropriation occurs or the intended expropriation becomes public knowledge, whichever is earlier. The valuation of the fair market value of the expropriated investment shall exclude any speculative or windfall profits claimed by the investor. The compensation shall be effectively realizable, freely transferable and shall be made without undue delay.

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, any measure of direct expropriation relating to land shall be:
   a. for a purpose in accordance with the applicable domestic legislation of the Contracting Party where the expropriated investment is located; and
   b. upon payment in accordance with the domestic legislation.

4. Where the fair market value cannot be ascertained, the compensation shall be determined in equitable manner taking into account all relevant factors and

circumstances, such as the capital invested, the nature and duration of the investment, replacement, and book value.

5. An investor of a Contracting Party affected by the expropriation carried out by the other Contracting Party shall have the right to prompt review of its case by a judicial authority or other competent and independent authority of the latter Contracting Party.

6. This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses granted in relation to intellectual property rights in accordance with the domestic laws of the host country, or to the revocation, limitation, or creation of intellectual property rights, to the extent that such issuance, revocation, limitation, or creation is consistent with the domestic laws of the host country.

ARTICLE 10
Compensation for losses

1. Investors of either Contracting Party who suffer losses of their investments in the territory of the state of the other Contracting Party due to war or other armed conflict, civil disturbances, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot shall be accorded with respect to restitution, indemnification, compensation or other settlement, treatment no less favourable than that accorded to its own investors or to investors of any third state, whichever is more favourable.

2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of a Contracting Party who in any of the events referred to in that paragraph suffer a loss in the territory of the state of the other Contracting Party resulting from the destruction of its investment or part thereof by the latter's forces or authorities, which was not required by the necessity of the situation, shall be accorded restitution or compensation.

ARTICLE 11
Transfers

1. Each Contracting Party shall permit all transfers relating to an investment to be made freely and without delay into and out of its territory. Such transfers include:

a. initial capital and additional amounts for the maintenance or increase of an investment;
b. returns;
c. proceeds from the sale of all or any part of the investment or from partial or complete liquidation of the investment;
d. payments made under a contract, including a loan agreement;
e. earnings of personnel engaged from abroad in connection to an investment in its territory; and
f. payments made pursuant to Articles 9 (Expropriation) and 10 (Compensation for Losses) of this Agreement;

2. Each Contracting Party shall permit transfers relating to an investment to be made in a freely convertible currency at the market rate of exchange prevailing on the date of transfer.

3. Each Contracting Party shall permit returns in kind relating to an investment as required or specified in a written agreement between the Contracting Party and an investment or an investor of the other Contracting Party.

4. Notwithstanding paragraphs 1, 2 and 3, a Contracting Party may prevent or delay or suspend a transfer through the equitable, non-discriminatory, and good faith application of its laws relating to:
   a. bankruptcy, insolvency, or the protection of the rights of creditors,
   b. issuing, trading, or dealing in securities;
   c. criminal or penal offenses and the recovery of proceeds of crime;
   d. financial reporting or record keeping of transfers when necessary to assist law enforcement or financial regulatory authorities;
   e. ensuring compliance with orders or judgments in judicial or administrative proceedings;
   f. social security, public retirement, or compulsory savings schemes;
   g. severance entitlements of employees; or
   h. the requirement to register and satisfy other formalities imposed by the central bank and other relevant authorities of a Contracting Party.

5. Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of the Contracting Parties as members of the IMF under the Articles of Agreement of the IMF, including

the use of exchange actions which are in conformity with the Articles of Agreement of the IMF.

ARTICLE 12

Denial of Benefits

1. A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an investor of the other Contracting Party that is a legal person of such other Contracting Party and to investments of that investor if persons of a non-Contracting Party own or control the legal person and the denying Contracting Party does not maintain diplomatic relations with the non-Contracting Party.

2. A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an investor which is a legal person of the other Contracting Party and to investments of that investor if that legal person has no substantial business operations in the territory of the State of the other Contracting Party and persons of a non-Contracting Party, or of the denying Contracting Party, own or control the legal person.

3. A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an investor which is a natural person of the other Contracting Party and to investments of that investor if that natural person acquired his or her nationality mainly for the purpose to obtain the benefits of this Agreement that would not otherwise be available to such investor.

4. A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an investor which is a natural person of the other Contracting Party and to investments of that investor if that natural person is also a national of the former Contracting Party.

5. A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement to an investor of the other Contracting Party that is a legal person of that other Contracting Party and to investments of that investor if persons of a non-Contracting Party own or control the legal person and the denying Contracting Party adopts or maintains measures with respect to the non-Contracting Party or a person of the non-Contracting Party that prohibit transactions with the legal person or that would be violated or circumvented if the benefits of this Agreement were accorded to the legal person or to its investments.

ARTICLE 13

Prohibition of Performance Requirements

1. Neither Contracting Party may impose or enforce on investors of the other Contracting Party any performance requirement in connection with the management, conduct or operation of their investments in the territory of that Contracting Party
2 Neither Contracting Party may impose or enforce the following requirements, or enforce a commitment or undertaking, in connection with the management, conduct or operation of a investment of investors of the other Contracting Party in its territory :
   a. to export a given level or percentage of goods;
   b. to achieve a given level or percentage of domestic content;
   c. to purchase, use or accord a preference to a good produced provided in its territory, or to purchase goods or services from a person in its territory;
   d. to relate the volume or value of imports to the volume or value of exports or to the amount of foreign exchange inflows associated with that investment;

3. Paragraph 1 and 2 of this Article shall not prejudice to the applicable laws and regulations of the host Contracting Party

4. This article shall not apply to investor to state dispute settlement under Article 17 (Settlements of Investment Disputes between an Investor of a Contracting Party and the other Contracting Party) of this Agreement.

5. With respect to this Article arbitrary or discriminatory measures cannot be applied by either Contracting Party.

ARTICLE 14

Right to Regulate

1. Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Contracting Party from adopting, maintaining or enforcing any measures otherwise consistent with this Agreement that it considers appropriate to:
   a. Secure compliance with laws and regulations of the Contracting Party that are not inconsistent with this Agreement;
   b. Protect environment or human, or plant life or health;

c. Regulate the conservation of living or non-living exhaustible natural resources; or

d. Ensure the maintenance or restoration of international peace or security, or the protection of its own essential security interests.

2. The adoption, maintenance or enforcement of such measures is subject to the requirement that they are not applied in an arbitrary or unjustifiable manner or do not constitute a disguised restriction on investments of the other Contracting Party.

ARTICLE 15
Transparency

1. Each Contracting Party shall endeavor to make publicly available its laws and regulations as well as international agreements to which the Contracting Party is a party, with respect to any matter covered by this Agreement.

2. Each Contracting Party shall endeavor to, upon the request by the other Contracting Party, within a reasonable period of time, provide information to the other Contracting Party with respect to matters referred to in paragraph 1.

3. When introducing or changing its laws and regulations that significantly affect the implementation and operation of this Agreement, each Contracting Party shall endeavor to take appropriate measures to enable interested persons to become acquainted with such introduction or change.

ARTICLE 16
Subrogation

1. If a Contracting Party or an agency of a Contracting Party makes a payment to an investor of that Contracting Party under a guarantee, a contract of insurance or other form of indemnity it has granted on non-commercial risk in respect of an investment, the other Contracting Party shall recognise the subrogation or transfer of any right or claim in respect of such investment. The subrogated or transferred right or claim shall not be greater than the original right or claim of the investor. This, however, does not necessarily imply recognition of the latter Contracting Party of the merits of any case or the amount of any claims arising therefrom.

2. Where a Contracting Party or an agency of a Contracting Party has made a payment to an investor of that Contracting Party and has taken over rights and claims of the investor, that investor shall not, unless authorised to act on behalf of the Contracting Party or the agency making the payment, pursue those rights and claims against the other Contracting Party.

3. Subrogation shall take place after the prior consent of the host Contracting Party in whose territory the investment is made, if such consent is required by that host Contracting Party.

ARTICLE 17

Settlements of Investment Disputes between an Investor of a Contracting Party and the other Contracting Party

1. This Article applies to legal disputes between an investor of a Contracting Party and the other Contracting Party arising out of the investment of the former in the territory of the state of the latter Contracting Party. Such dispute shall concern an alleged breach of an obligation of the Contracting Party under this Agreement which caused loss or damages to the investor of the other Contracting Party.

2. To start consultations, the investor shall deliver to the Contracting Party a written notice. The notice shall specify details of the dispute such as:
   a. the name and address of the disputing investor;
   b. the provisions of this Agreement alleged to have been breached; and
   c. the factual and legal basis for the claim.

3. If the dispute cannot be settled amicably within six months from the date of receipt of the written notice, the disputing investor shall submit the dispute to an ad hoc joint committee co-chaired by senior officials from both Contracting Parties (hereinafter referred to as the Joint Committee) with the presence of the disputing investor or its designee, to settle the dispute with a view to achieve mutually agreed solution. The decision of the Joint Committee shall be final and binding and shall exclude the investors' right to submit the dispute in any other forums. In the event that the Joint Committee fails to issue the decision within six months from the date of the process, the disputing investor may submit the dispute to one of the following forums:

a. by a competent court of the Contracting Party in whose territory the investment is made; or
b. by arbitration under the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), established by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington on 18th March 1965 provided that both Contracting Parties are party to the said Convention; or
c. by arbitration under the Additional Facility of ICSID, if only one of the Contracting Parties is a signatory to the Washington Convention; or
d. by arbitration before a tribunal of three arbitrators in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), as amended in 2010.

4. The award shall be final and binding. Each Contracting Party shall ensure the recognition and enforcement of the arbitral award in accordance with its laws and regulations, the norms and principles of international law.
5. Disputes arising out of any contract concluded between the investor and any designated entity of a Contracting Party or its local government concerning the investment of those investors shall be settled according to the dispute settlement procedure stipulated therein.

6. In the event that an investment dispute has been submitted for resolution under one of the forums provided for in paragraph 3 of this Article, the same investment dispute shall not be submitted for resolution under any other available forums as provided for in paragraph 3 of this Article.

7. No investment dispute may be submitted for resolution by arbitration under paragraph 3 of this Article if more than three years have elapsed from the date on which the investor first acquired or should have acquired knowledge of the alleged breach and loss or damage that the latter has allegedly incurred.

ARTICLE 18

Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, as far as possible, be settled through consultations and/or other diplomatic channels.

2. If the Contracting Parties cannot reach an agreement within six months following the date on which the consultations were requested and/or other diplomatic channels were initiated by either Contracting Party, the dispute shall, upon the request of the Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal. In the absence of an agreement by the Contracting Parties to the contrary, arbitration proceedings shall be conducted in accordance with the Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States, except as modified by the Contracting Parties or this Agreement.

3. Unless the Parties otherwise agree, the dispute shall be resolved by a three member arbitration tribunal. Each Contracting Party shall appoint one arbitrator within two months from the date on which either Contracting Party receives from the other Contracting Party a request for arbitration. The two arbitrators thus selected shall together within a further two months period, select a third arbitrator who is a national of a third State. The third arbitrator once approved by the two Contracting Parties, shall act as Chairman of the arbitral tribunal.

4. If any member of the arbitral tribunal is not selected within the time frames defined in paragraph 3 of this Article, the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration, upon the request of either Contracting Party, shall appoint, in his or her discretion, the arbitrator or arbitrators not yet appointed.

5. The place of the arbitration proceedings shall be The Hague, The Netherlands.

6. The arbitral tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. The decisions shall be final and binding upon each Contracting Party.

7. Expenses incurred by the arbitrators, and other costs of the proceedings, shall be borne equally by the Parties. The arbitral tribunal may, however, in its discretion, decide that a higher proportion of costs shall be paid by one of the Contracting Parties.

ARTICLE 19

Balance of Payments Measures

1. A Contracting Party may, in a non-discriminatory manner adopt or maintain restrictions on payments or transfers related to investments in like situations:
   a. in the event of a serious balance of payments and external financial difficulties or threat thereof; or
   b. in cases where, in exceptional circumstances, movements of capital cause or threaten to cause serious difficulties for macroeconomic management, in particular, monetary and exchange rate policies.
2. The restrictions referred to in paragraph 1 shall:
   a be consistent with the Articles of Agreement of the IMF;
   b. avoid unnecessary damage to the commercial, economic, and financial interests of the other Contracting Party;
   c. not exceed those necessary to deal with the circumstances described in paragraph 1;
   d. be temporary and be phased out progressively as the situation specified in paragraph 1 improves;
   e. not treat the other Contracting Party less favourably than a non-Contracting Party in like situations;
3. Any restrictions adopted or maintained under paragraph 1, or any changes therein, shall be promptly notified to the other Contracting Party.

ARTICLE 20

Prudential Measures

1. Notwithstanding any other provisions of this Agreement, a Contracting Party shall not be prevented from taking measures, in a non-discriminatory manner, relating to financial services for prudential reasons, including measures for the protection of investors, depositors, policy holders, or persons to whom a fiduciary duty is owed by

an enterprise supplying financial services, or to ensure the integrity and stability of its financial system.

2. Where the measures taken by a Contracting Party pursuant to paragraph 1 do not conform with this Agreement, they shall not be used as a means of avoiding the commitments or obligations of the Contracting Party under this Agreement.

Nothing in this Agreement shall be construed to require a Contracting Party to disclose information relating to the affairs and accounts of individual customers or any confidential or proprietary information in the possession of public entities.

ARTICLE 21
Amendments

As agreed between the Contracting Parties, the amendments and additions may be made to this Agreement, which shall be concluded in the form of a protocol to this Agreement and shall enter into force according to the paragraph 1 of Article 22 of this Agreement. This protocol shall constitute an integral part of this Agreement.

ARTICLE 22
Entry into Force, Duration and Termination

1. This Agreement shall enter into force thirty days after the date of the exchange of instruments of ratification by the Contracting Parties.

2. This Agreement shall remain in force for a period of ten years and shall continue to be in force thereafter unless terminated in accordance with paragraph 3.

3 Either Contracting Party may terminate this Agreement at the end of the initial ten-year period or at any time thereafter by sending to the other Contracting Party a one year prior written notice through the diplomatic channels.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized to that effect, have signed this Agreement.

DONE at Bogor, Indonesia as of the Twenty-Fourth day of July in the year Two Thousand and Nineteen in duplicate each in the Indonesian, Arabic, and English languages. All texts are equally authentic. In case of divergence in interpretations of provisions of this Agreement by the Contracting Parties, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

RETNO L. P. MARSUDI
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

FOR THE GOVERNMENT
OF THE UNITED ARAB EMIRATES

SULTAN BIN AHMED ALJABER
MINISTER OF STATE

REPUBLIK INDONESIA

PROTOCOL

At the time of signing of the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates for the Promotion and Protection of Investment (hereinafter referred to as "the Agreement"), both Governments have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Agreement.

1. With reference to paragraph 1 of Article 1 (Definitions) and paragraph 2 of Article 2 (Scope) of the Agreement:

   For greater certainty, it is understood that investments made by investors of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, "laws and regulations" shall refer to the Investment Law of that Contracting Party .

2. With reference to paragraph 1 of Article 1 (Definitions) of the Agreement:

   For greater certainty, it is understood that for the purposes of the Agreement, goodwill, market share or other similar intangible rights shall not be considered as an investment.

3. With reference to paragraph 1(1)(b) of Article 1 (Definitions) of the Agreement:

   For greater certainty, it is understood that for the purposes of the Agreement, the term company shall be limited to a company of an investor established under the laws of the host State and located in the territory of the host State.

4. With reference to paragraph 2(a) of Article 1 (Definitions) of the Agreement:

   In the case of Indonesia, it is understood that if a natural person possesses dual nationality, she or he shall be deemed to be exclusively a national of the country

where she or he ordinarily resides. And in addition, if a natural person is a national of both Contracting Parties, she or he will be deemed to be the national of the Contracting Party where her or his investment is located.

5. With reference to paragraph 6 (a) of Article 2 (Scope) of the Agreement:

   For greater certainty, it is understood that "government procurement" means the process by which a government obtains the use of or acquires goods or services, or any combination thereof, for governmental purposes and not with a view to commercial sale or resale or use in the production or supply of goods or services for commercial sale or resale.

6. With reference to paragraph 6 (b) of Article 2 (Scope) of the Agreement:

   For greater certainty, it is understood that a "service supplied in the exercise of governmental authority" means any service, which is supplied neither on a commercial basis nor in competition with one or more service suppliers.

7. With reference to paragraph 6 (d) of Article 2 (Scope) of the Agreement:

   For greater certainty, it is understood that the Agreement shall not affect the rights and obligations of any Contracting Party under any tax convention.

8. With reference to Article 5 (Promotion of Investment) of the Agreement:

   For greater certainty, it is understood that a breach of a contract shall not be considered as a breach of this Agreement.

9. With reference to Article 7 (Most-Favoured-Nation Treatment) and Article 8 (National Treatment) of the Agreement:

   For greater certainty, it is understood that whether treatment is accorded in "like circumstances" under Articles 7 (Most Favoured Nation) and 8 (National Treatment) of the Agreement depends on the totality of the circumstances, including whether the relevant treatment distinguishes between investors or investments on the basis of legitimate public welfare objectives.

10. With reference to paragraph 1 (*Chapeau*) of Article 9 (Expropriation) of the Agreement:

For greater certainty, it is understood as follows:

a. An action or a series of actions by a Contracting Party cannot constitute an expropriation unless it interferes with a tangible or intangible property right or in an investment.

b. Article 9 (Expropriation) of the Agreement addresses two situations. The first is direct expropriation, in which an investment is nationalized or otherwise directly expropriated through formal transfer of title or outright seizure.

c. The second situation addressed by Article 9 (Expropriation) of the Agreement is indirect expropriation, in which an action or series of actions by a Contracting Party is carried out without formal transfer of title or outright seizure.

(1) The determination of whether an action or series of actions by a Contracting Party, in a specific fact situation, constitutes an indirect expropriation, requires a case-by-case, fact-based inquiry that considers, among other factors:

a. the economic impact of the government action, although the fact that an action or series of actions by a Contracting Party has an adverse effect on the economic value of an investment, standing alone, does not establish that an indirect expropriation has occurred;

b. the extent to which the government action interferes with distinct, reasonable investment backed expectations arising out of the Contracting Party's prior binding written commitment to the investor; and

c. the character of the government action.

11. With reference to paragraph 1(c) of Article 9 (Expropriation):

For greater certainty, it is understood that where there is a dispute about whether a government conduct amounts to indirect expropriation within the meaning of Article 9 (Expropriation) of the Agreement, the fact that compensation has not been paid while that dispute remains unresolved does not render that conduct inherently unlawful if it

is subsequently found to constitute indirect expropriation within the meaning of that Article.

12. With reference to paragraph 6 of Article 9 (Expropriation) of the Agreement:

    For greater certainty, it is understood that the term "revocation" of intellectual property rights includes the cancellation or nullification of those rights, and the term "limitation" of intellectual property rights includes exceptions to those rights.

13. With reference to subparagraphs (g) and (h) of paragraph 4 of Article 11 (Transfers) of the Agreement:

    For greater certainty, it is understood that situations under subparagraphs (g) and (h) refers to, or derives from. a situation where an investment is terminated by investor and the investors fails to fulfil its obligation in relation to those subparagraphs.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by the respective Governments, have signed this Protocol.

DONE IN Bogor, Indonesia on the Twenty-fourth day of July in the year Two Thousand and Nineteen in duplicate in the English, Indonesia and Arabic languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Protocol, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

RETNO L. P. MARSUDI
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

FOR THE GOVERNMENT
OF THE UNITED ARAB EMIRATES

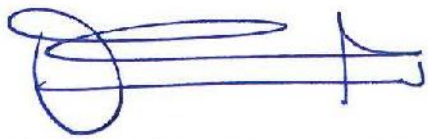

SULTAN BIN AHMED ALJABER
MINISTER OF STATE

Salinan naskah resmi
Certified true copy

Nomor : 0058/CTC/04/2020/52
Number

Sulaiman
NIP. 19651025 199103 1 017

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 30 April 2020
Date